



**PUSAT
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
MANAJEMEN**

LAPORAN PPID TRIWULAN II

Periode April-Juni

2021

Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik - Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Triwulan II Periode April-Juni Tahun Anggaran 2021.

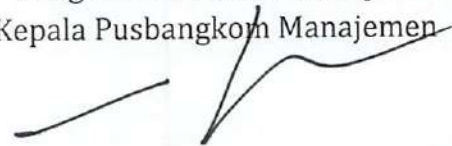
Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi kegiatan publikasi yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sebagaimana menjadi salah satu tugas tambahan dalam pengelolaan kegiatan di lingkungan Pusat. Bentuk kegiatan publikasi yang dilakukan meliputi publikasi secara digital maupun cetak yang menitikberatkan pada capaian kegiatan serta informasi-informasi terkait kegiatan pengembangan kompetensi sehingga khalayak selain dapat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan juga ke depan dapat tertarik dan turut serta dalam mengikuti kegiatan dimaksud.

Pada laporan yang telah tersusun ini, kami menyadari terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja Petugas Layanan Informasi dalam melakukan penyajian informasi, kinerja dan peran Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan SDM - Kementerian PUPR dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM PUPR melalui pelayanan informasi bagi publik.

Jakarta, 5 Juli 2021

Pengarah PPID Daerah Tipe I
Kepala Pusbangkom Manajemen



Ir. Moeh. Adam, MM
NIP. 196503031992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GRAFIK.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Maksud dan Tujuan	7
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP	8
2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP	9
2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik	12
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik	19
2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik	22
2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik.....	25
BAB III KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	37
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui Instagram	15
Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui Ruang Layanan Informasi	15
Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui Pesan Singkat	16
Tabel 4 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Instagram	16
Tabel 6 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Pesan Singkat.....	17
Tabel 7 - Status Pelayanan Informasi.....	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 - Asal Kota Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen.....	12
Grafik 2 - Jenis Kelamin Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen	12
Grafik 3 - Rentang Usia Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen	13
Grafik 4 - Waktu Aktif Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen.....	13
Grafik 5 - Aktivitas Permohonan Informasi Melalui Twitter.....	14
Grafik 6 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui Instagram	15
Grafik 8 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui Pesan Singkat.....	16
Grafik 9 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Instagram	17
Grafik 10 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Pesan Singkat	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen	10
Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan	10
Gambar 3 - Publikasi Kegiatan Pusbangkom Manajemen di Media Sosial	10
Gambar 4 - Publikasi Informasi melalui X-Banner	11
Gambar 5 - Publikasi di TV Corner	11
Gambar 6 - Publikasi Informasi di Info Dinding.....	11
Gambar 7 - Aktivitas Permohonan Informasi	14
Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen.....	19
Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen.....	19
Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	20
Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	20
Gambar 12 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	21
Gambar 13 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen	21
Gambar 14 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen.....	21
Gambar 15 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020	22
Gambar 16 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen.....	22
Gambar 17 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019	22
Gambar 18 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 56/KPTS/MF/2021	25
Gambar 19 - Ruang Layanan Informasi Publik	22
Gambar 20 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik.....	22
Gambar 21 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial	23
Gambar 22 - TV Corner.....	24
Gambar 23 - Info Dinding	24
Gambar 24 - X-Banner	25
Gambar 25 - Alat Dokumentasi	25
Gambar 26 - Video Animasi Mengenai Jurnal Infrastruktur	26
Gambar 27 - Video Dokumentasi Kegiatan & Pelatihan	26
Gambar 28 - Tab Informasi Publik di website BPSDM	26
Gambar 29 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM April-Juni	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era keterbukaan informasi, masyarakat sangat mudah memperoleh informasi dari berbagai media, dan informasi pun tersebar dalam waktu yang singkat. Berbagai institusi/organisasi pun berlomba-lomba melakukan penyebarluasan informasi tak terkecuali instansi pemerintah. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun menyampaikan perlunya publikasi kinerja pemerintah kepada masyarakat karena saat ini masyarakat perlu mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Publikasi kinerja pemerintah pun ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, turut mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Sehingga tujuan pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan struktur organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat, pelaksana PPID Pusat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR adalah Bagian Data dan Informasi.

Untuk menjalankan fungsi PPID tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyampaikan bahwa Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, merupakan PPID BPSDM Daerah Tipe I.

Adapun tugas dari Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I adalah:

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelola informasi dan dokumentasi di PPID BPSDM Daerah Tipe I;
- b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I dalam proses penyelesaian sengketa informasi;
- c. Memberikan arahan kepala pelaksanaan tugas Pelaksana PPID BPSDM Daerah Tipe I; dan
- d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepala Pengarah PPID BPSDM.

Sedangkan jenis pelayanan informasi Pengarah PPID BPSDM Daerah Tipe I yang diberikan kepada publik adalah:

- a. Informasi Pelatihan: meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).
- b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan: meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);
- c. Informasi Kinerja: Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) Triwulan II Periode April-Juni Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman stakeholders terkait mengenai tugas, fungsi, program, dan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajemen di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pelaporan kepada PPID Pusat BPSDM.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Menyebarkan informasi mengenai tugas, fungsi, program dan kegiatan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen kepada Pegawai Kementerian PUPR dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), masyarakat umum, kalangan akademisi, dan pers;
- b. Meningkatkan pengetahuan stakeholders terkait mengenai Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
- c. Melengkapi kebutuhan data PPID Pusat BPSDM; dan
- d. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan arahan dan kebijakan selanjutnya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kebijakan Internal Terkait Dengan Implementasi UU KIP

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada pula kewajiban untuk bertanggungjawab atas penggunaan anggaran melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP yang di jelaskan pula dalam Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018 tentang SAKIP yang menjadi acuan Pusbangkom Manajemen untuk mempublikasi informasi terutama capaian kinerja dari Pusbangkom Manajemen.

Untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 56/KPTS/MF/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun beberapa tugas dari PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Pusbangkom Manajemen) adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang ada di masing - masing unit organisasi (unor);
- b. Menyediakan Dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Sekretariat PPID;
- c. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi pada unor terkait;
- d. Membantu PPID Pusat dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- e. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Pusat.

Sedangkan jenis pelayanan informasi PPID Pusbangkom Manajemen yang diberikan kepada publik adalah:

a. Informasi Pelatihan

Meliputi jadwal pelaksanaan pelatihan (berkala), tempat pelaksanaan diklat, persyaratan peserta, dan tata cara registrasi untuk mengikuti diklat, serta rekap penyelenggaraan pelatihan (setiap saat).

b. Informasi Beasiswa Pendidikan Kedinasan

Meliputi jadwal pelaksanaan rekrutmen, pengajuan surat rekomendasi beasiswa yang masuk menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengajukan beasiswa, dan tata cara pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi beasiswa (berkala);

c. Informasi Kinerja

Meliputi Laporan Monitoring dan Evaluasi (berkala).

2.2. Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP

Implementasi Pelaksanaan kegiatan terkait KIP yang dilaksanakan di Pusbangkom Manajemen antara lain :

2.2.1. Penyediaan Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara khusus telah membangun Ruang Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen yang terletak di Gedung Pusbangkom Manajemen Lantai 1 sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk keterangan detail akan diuraikan pada subbab 2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.

2.2.2. Peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen secara rutin mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka dari itu, peliputan dan pendokumentasian sangat di perlukan guna pelaporan kepada pimpinan dan publikasi. Peliputan dan pendokumentasian meliputi pengambilan foto dan pengumpulan data kegiatan.



Gambar 1- Pendokumentasian Kegiatan Internal Pusbangkom Manajemen

Hasil pendokumentasian diarsipkan secara digital dalam bentuk folder dan diberi judul sesuai nama kegiatan.

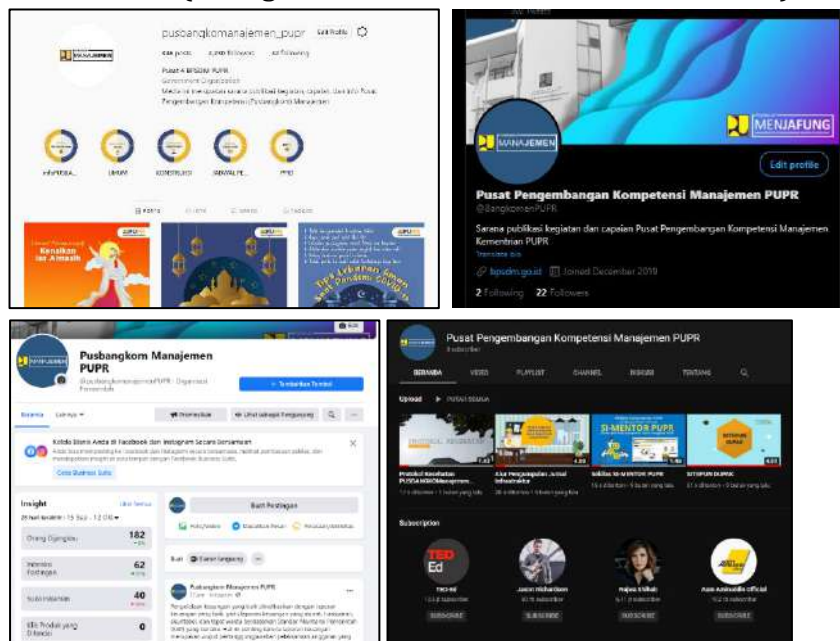
PEMBUKAAN BENDAHARA PENGELOAR...	12/10/2020 8:11	File Folder
PEMBUKAAN BENDAHARA PENGELOAR...	02/09/2020 13:39	File Folder
PEMBUKAAN BENDAHARA PENGELOAR...	24/09/2020 15:35	File Folder
PEMBUKAAN BIM SEY	08/10/2020 8:46	File Folder
PEMBUKAAN BIMTEK POKIA PBI SEV	02/07/2020 11:46	File Folder
PEMBUKAAN BIMN B PSK	22/07/2020 15:44	File Folder
PEMBUKAAN BIMN BIM	07/09/2020 14:28	File Folder
PEMBUKAAN BIMN PLB	09/08/2020 16:58	File Folder
PEMBUKAAN ESTIMASI BUKA KONS	05/08/2020 15:01	File Folder
PEMBUKAAN HIK	23/07/2020 10:44	File Folder
PEMBUKAAN MANAJEMEN RESKO INVE...	12/10/2020 8:13	File Folder
PEMBUKAAN NSUP MIDN	08/10/2020 9:53	File Folder
PEMBUKAAN PBI YK	29/09/2020 9:26	File Folder
PEMBUKAAN PERENCANAAN ANGGAR...	29/09/2020 9:16	File Folder
PEMBUKAAN PERENCANAAN ANGGAR...	05/10/2020 9:16	File Folder
PEMBUKAAN PHLN BIM	12/09/2020 14:47	File Folder
PEMBUKAAN PKA	13/08/2020 13:57	File Folder
PEMBUKAAN PKN II	22/07/2020 16:44	File Folder
PEMBUKAAN PKP MIDN	29/09/2020 9:34	File Folder
PEMBUKAAN PKP SEV	08/10/2020 8:48	File Folder
PEMBUKAAN PKP PLB	05/10/2020 9:45	File Folder
PEMBUKAAN RALHTA PASOK	24/07/2020 12:55	File Folder
PEMBUKAAN SMK BIM	27/09/2020 11:15	File Folder
PEMBUKAAN SMK PLB	08/09/2020 12:27	File Folder
PEMBUKAAN SMK YK	05/10/2020 10:04	File Folder
PEMBUKAAN TOT	24/07/2020 15:21	File Folder
PEMBUKAAN WORKSHOP KONSTRUKSI JKT	08/10/2020 8:36	File Folder
PEMBUKAAN WORKSHOP PKN II	22/07/2020 16:44	File Folder
PEMBUKAAN MANAJEMEN PROYEK INKL...	14/09/2020 9:11	File Folder
PEMBUKAAN SMK RGD	29/09/2020 9:24	File Folder
PEMBUKAAN RELUANGAN CPNS	22/07/2020 16:44	File Folder
PENUTUPAN BENDAHARA PENGELOAR...	09/09/2020 8:23	File Folder
PENUTUPAN BIMN	22/07/2020 16:44	File Folder
PENUTUPAN BIMN PLB	08/10/2020 8:51	File Folder
PENUTUPAN ESTIMASI	12/08/2020 14:53	File Folder
PENUTUPAN HIK	24/07/2020 15:48	File Folder
PENUTUPAN KPSU BIM	29/09/2020 9:41	File Folder
PENUTUPAN MANAJEMEN KANTOR PASOK	30/07/2020 9:35	File Folder
PENUTUPAN MANAJEMEN RESKO	30/07/2020 11:55	File Folder
PENUTUPAN PERENCANAAN ANGGAR...	29/09/2020 10:55	File Folder
PENUTUPAN BIMN	22/07/2020 16:44	File Folder
PENUTUPAN BIMN BIM	24/08/2020 13:48	File Folder
PENUTUPAN SAH MEN	29/09/2020 9:29	File Folder

Gambar 2 - Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan

2.2.3. Publikasi Produk Pusbangkom Manajemen

Hasil peliputan dan produk-produk Pusbangkom Manajemen dipublikasikan melalui kanal-kanal penayangan atau media informasi Pusbangkom Manajemen baik media cetak maupun digital. Kanal-kanal yang digunakan, antara lain:

a. Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube)



Gambar 3 - Publikasi Kegiatan Pusbangkom Manajemen di Media Sosial

b. X-Banner



Gambar 4 - Publikasi Informasi melalui X-Banner

c. TV Corner



Gambar 5 - Publikasi di TV Corner

d. InDing (Info Dinding)



Gambar 6 - Publikasi Informasi di Info Dinding

2.3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

2.3.1. Jumlah Pemohon Informasi

Ada beberapa media yang digunakan Pusbangkom Manajemen untuk layanan permohonan informasi, diantaranya melalui Instagram (Kolom komentar dan Direct Message), Aplikasi Instant Messaging (WhatsApp), dan secara langsung di Ruang Layanan Informasi. Adapun jumlah pemohon informasi di setiap media, yaitu :

a. Pemohon Informasi Secara Langsung

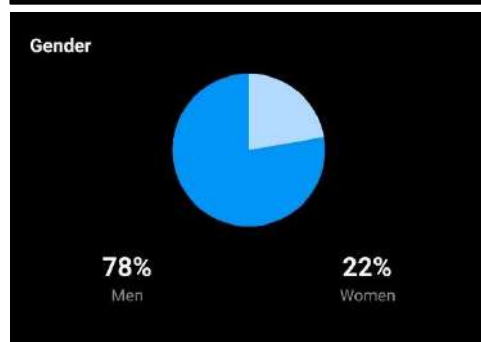
Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen dibuka sejak September 2019 dan telah melayani secara langsung pemohon informasi pada hari dan jam kerja. Jam operasional Ruang Layanan Informasi kami, dari pukul 09.00-11.00 dan 13.00-15.00 WIB. Tetapi, di luar jam tersebut kami tetap melayani permohonan informasi hingga batas waktu jam kerja selesai.

b. Instagram

Sejak akun Instagram Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen @pusbangkomanajemen_pupr aktif pada 1 Juli 2019 sampai disusunnya laporan ini, jumlah followernya adalah 2.370 akun. Berikut ini adalah data tentang asal kota, jenis kelamin, usia, dan aktivitas follower sebagai Pemohon Informasi pada akun Instagram Pusbangkom Manajemen:



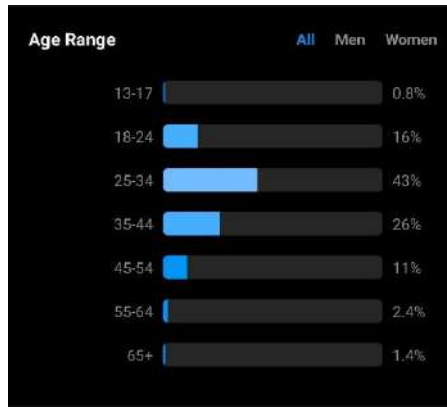
Grafik 1 - Asal Kota Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen



Grafik 2 - Jenis Kelamin Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen

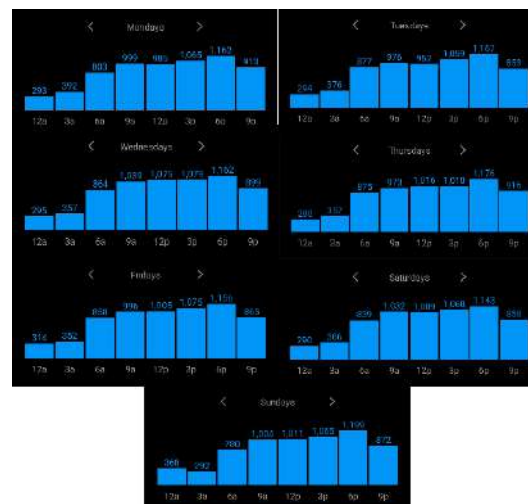
Berdasarkan grafik di atas, diperoleh informasi bahwa pengikut akun Instagram Pusbangkom Manajemen terbanyak berasal dari kota Jakarta. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, pengikut akun Instagram

Pusbangkom Manajemen didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 78%, sedangkan sisanya sebanyak 22% adalah perempuan.



Grafik 3 - Rentang Usia Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen

Terlihat dari grafik di atas bahwa usia 25 s.d 34 tahun mendominasi sebanyak 43% dan diikuti oleh rentang usia 35 s.d 44 tahun sebanyak 26%. Dengan mempertimbangkan grafik diatas, Pusbangkom Manajemen menyajikan konten-konten dengan desain yang menarik untuk mengikuti selera segmentasi pengikut di rentang usia 25 s.d 34 tahun.

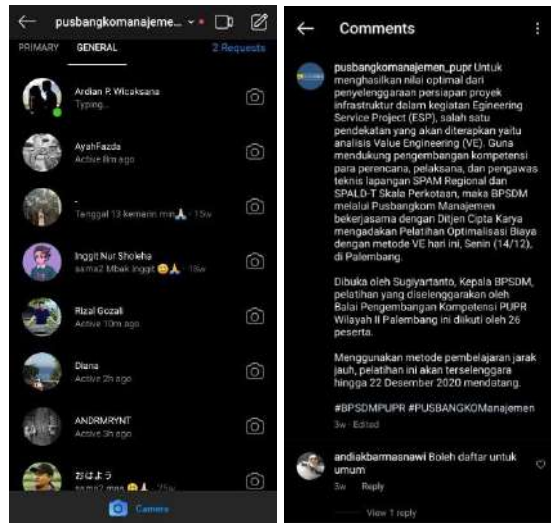


Grafik 4 - Waktu Aktif Pengikut Instagram Pusbangkom Manajemen

Waktu aktif nya pengikut akun Instagram Pusbangkom Manajemen di dominasi pada pukul 18.00 WIB setiap hari nya. Dalam hal ini, berpengaruh terhadap jangkauan pengikut pada unggahan akun Pusbangkom Manajemen dan berpengaruh juga pada waktu dimana paling banyak permohonan informasi masuk melalui akun Instagram.

Pertanyaan yang masuk akun instagram @pusbangkomanajemen_PUPR, masih dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Pertanyaan dari koresponden selalu di konfirmasi ke bidang terkait guna memastikan konfirmasi yang kami berikan tervalidasi dengan baik. Jenis pertanyaan

yang di ajukan oleh koresponden di Instagram, didominasi oleh jadwal Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan alur pendaftarannya.



Gambar 7 - Aktivitas Permohonan Informasi

Grafik di atas merupakan contoh aktivitas permohonan informasi secara informal yang dilakukan melalui akun instagram Pusbangkom Manajemen (dari kiri ke kanan: pertanyaan melalui pesan langsung instagram, dan pertanyaan melalui kolom komentar).

c. Twitter

Berikut ini data impresi akun Twitter Pusbangkom Manajemen:



Grafik 5 - Aktivitas Permohonan Informasi Melalui Twitter

2.3.2. Persentase Data Pekerjaan Pemohon

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon informasi dibagi 3 (tiga) yaitu orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum/badan publik. Dari beberapa media yang digunakan sebagai sarana permohonan informasi di Pusbangkom Manajemen, permohonan secara langsung, permohonan melalui media sosial Instagram dan pesan singkat yang aktif. Berikut ini

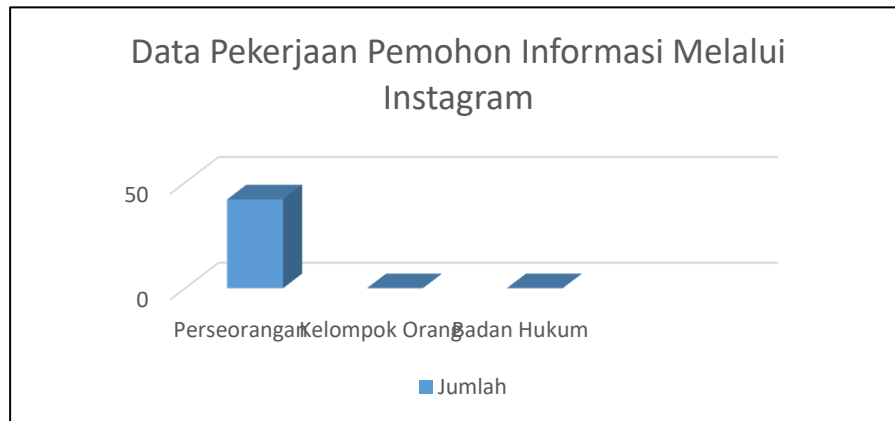
adalah jumlah pemohon informasi yang dibagi berdasarkan media yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan informasi terkait Pusbangkom Manajemen:

a. Instagram

Tabel 1 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui Instagram

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	42	100%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		42	100%

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui Instagram, seluruh permohonan berasal dari kategori perseorangan sebanyak 42 orang.



Grafik 6 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui Instagram

b. Permohonan Langsung

Tabel 2 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui Ruang Layanan Informasi

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	0	0%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		0	0%

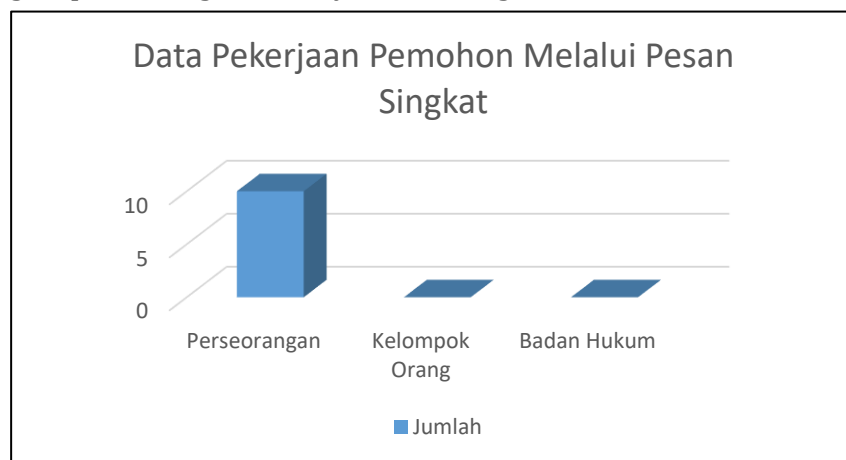
Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa tidak ada permohonan informasi secara langsung. Dikarenakan pembatasan dalam berpergian pada masa pandemic COVID-19. Dalam keadaan pandemi saat laporan ini disusun, layanan informasi memang lebih di arahkan secara daring.

c. Pesan Singkat

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perseorangan	10	100%
2.	Kelompok Orang	0	0%
3.	Badan Hukum	0	0%
Jumlah		10	100%

Tabel 3 - Data Pekerjaan Pemohon Melalui Pesan Singkat

Berdasarkan hasil rekapitulasi, diketahui bahwa pemohon informasi melalui pesan singkat, seluruh permohonan berasal dari kategori peseorangan sebanyak 10 orang.



Grafik 7 - Data Pekerjaan Pemohon Informasi Melalui Pesan Singkat

2.3.3. Jumlah Permintaan Informasi

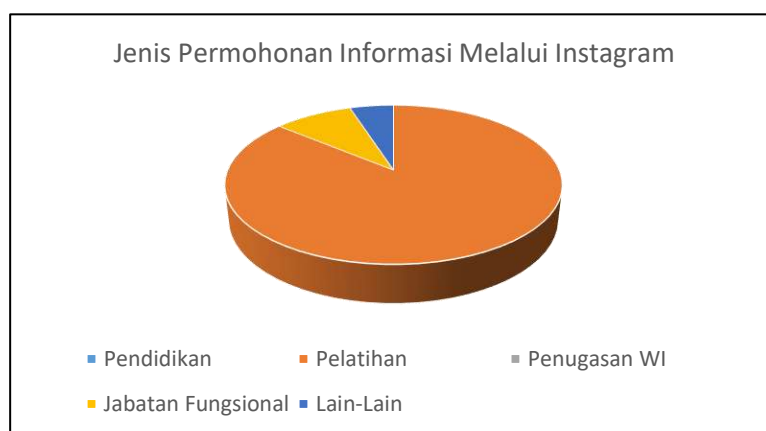
Permintaan informasi di Pusbangkom Manajemen dibagi menjadi beberapa jenis informasi, yaitu terkait Pendidikan, Pelatihan, Penugasan Widyaiswara, dan informasi Lain-lain.

a. Instagram

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	36	86%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	4	9%
5.	Lain-lain	2	5%
Jumlah		42	100%

Tabel 4 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Instagram

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, diketahui bahwa jumlah permintaan informasi terbanyak melalui Instagram adalah topik tentang Pelatihan yaitu sebanyak 86% dari keseluruhan permohonan informasi.



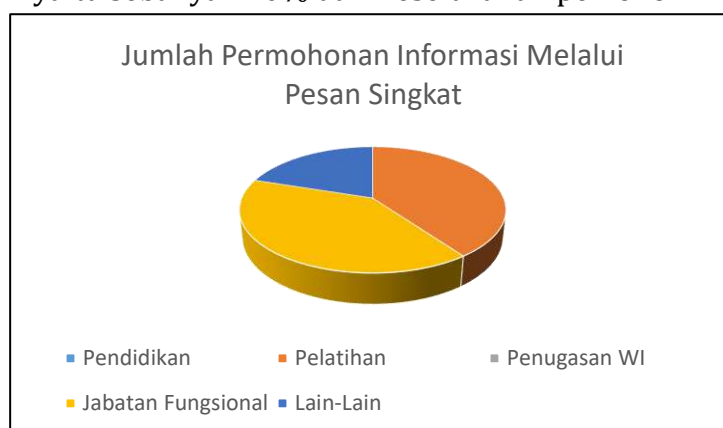
Grafik 8 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Instagram

b. Pesan Singkat

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pendidikan	0	0%
2.	Pelatihan	4	40%
3.	Penugasan Widyaiswara	0	0%
4.	Jabatan Fungsional	4	40%
5.	Lain-lain	2	20%
Jumlah		10	100%

Tabel 5 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Pesan Singkat

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, topik yang mendominasi permintaan informasi melalui pesan singkat adalah informasi terkait Pelatihan yaitu sebanyak 40% dari keseluruhan pemohon informasi.



Grafik 9 - Jumlah Permohonan Informasi Melalui Pesan Singkat

2.3.4. Status Pelayanan Informasi

Media	Status	Jumlah	Persentase
Instagram	Dipenuhi	42	99%
R. Layanan Info.		0	0%
Pesan Singkat		10	100%

Tabel 6 - Status Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi, permohonan informasi yang masuk Ruang Layanan Informasi dan Pesan Singkat Pusbangkom Manajemen 100% dipenuhi.

2.3.5. Rata-rata Waktu Pelayanan

Permohonan informasi publik Pusbangkom Manajemen baik melalui media sosial (Instagram, Twitter, dan Facebook), Ruang Layanan Publik, dan Pesan Singkat Pusbangkom Manajemen adalah 5 (lima) hari kerja (Senin s.d. Jumat). Waktu untuk layanan informasi mengikuti jam kerja, yaitu mulai pukul 08.00 s.d. pukul 16.30 WIB.

Proses/tindak lanjut dari permohonan informasi adalah 10 hari kerja terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan informasi ditambah 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan tergantung sifat dari informasi yang ditanyakan.

2.3.6. Informasi/Data yang Diminta Pemohon

Permohonan informasi di Pusbangkom Manajemen di dominasi oleh topik mengenai Pelatihan dan Jabatan Fungsional. Baik mengenai jadwal, syarat-syarat pendaftaran, maupun sistematika pendaftarannya. Adapun info lain mengenai Pendidikan dan lain-lain.

2.3.7. Media Permintaan Informasi

Seperti yang sudah di jabarkan sebelumnya, Pusbangkom Manajemen menyediakan beberapa media yang bisa digunakan pemohon, yaitu media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube), Ruang Layanan Informasi, dan saat masa pandemi pelayanan informasi khususnya mengenai penugasan WI banyak dilakukan melalui pesan singkat.

2.3.8. Jumlah Sengketa Informasi

Sampai dengan kurun waktu tahun 2021 tidak ada sengketa informasi terhadap pelayanan informasi publik Pusbangkom Manajemen.

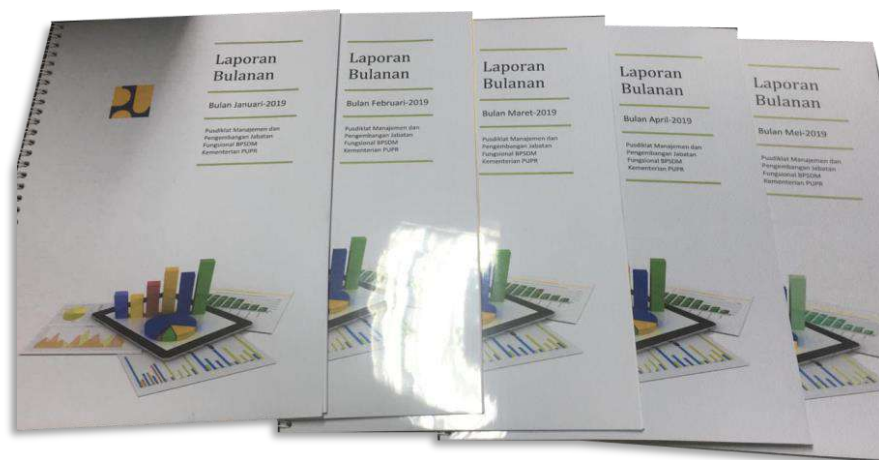
2.4. Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik

a. Informasi Berkala

Pusbangkom Manajemen menyediakan informasi berkala mengenai Laporan Bulanan terkini, Laporan Kinerja organisasi, Laporan PPID per-Triwulan, Profil Kerja, serta Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat.

1. Laporan Bulanan

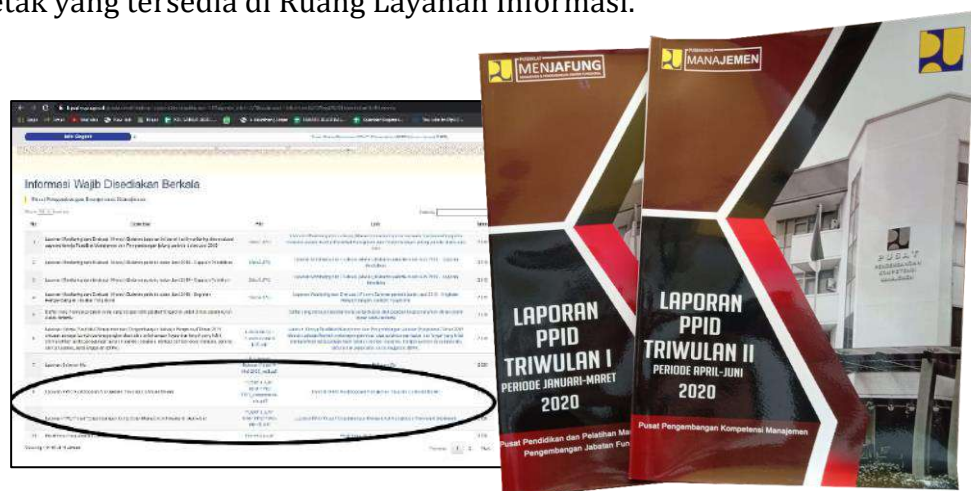
Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen diterbitkan paling lambat tanggal 5 di bulan berikutnya disediakan dan dipublikasi dalam bentuk digital. Selain dimuat dalam halaman *website* e-SAKIP yang dikelola oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (PAKLN), juga dapat di akses di *website* BPSDM halaman PPID BPSDM Daerah.



Gambar 8 - Laporan Bulanan Pusbangkom Manajemen

2. Laporan PPID per-Triwulan

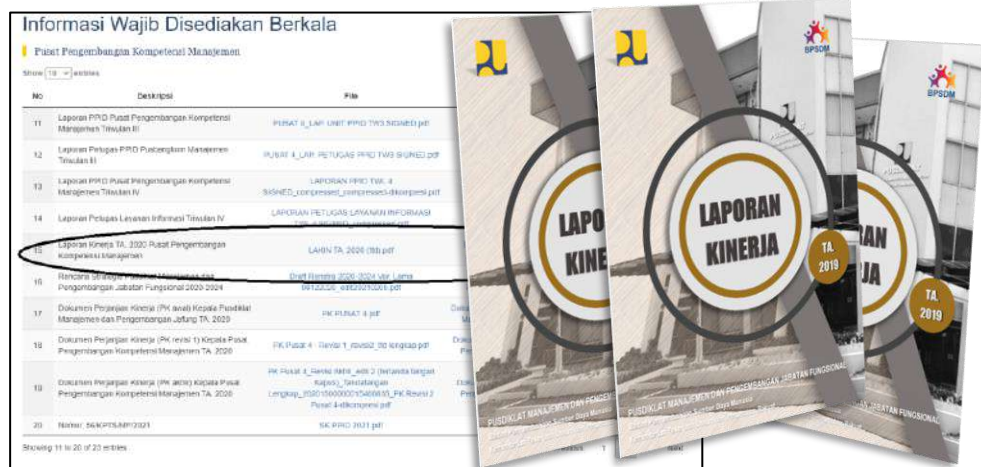
Laporan PPID Pusbangkom Manajemen di disediakan per-Triwulan dan disediakan dalam bentuk digital melalui *website* BPSDM.pu.go.id dan cetak yang tersedia di Ruang Layanan Informasi.



Gambar 9 - Laporan PPID per-Triwulan Pusbangkom Manajemen

3. Laporan Kinerja

Pusbangkom Manajemen menyediakan Laporan Kinerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



Gambar 10 - Laporan Kinerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

4. Profil Kerja Pusbangkom Manajemen

Pusbangkom Manajemen menyediakan Profil Kerja dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



Gambar 11 - Profil Kerja Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

5. Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat

Pusbangkom Manajemen menyediakan Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat dalam bentuk digital yang bisa di akses di *website* BPSDM.



b. Informasi Wajib Setiap Saat

Informasi wajib setiap saat yang disediakan Pusbangkom Manajemen diantaranya adalah Jadwal Kepala Pusat per-Tahun, Produk Hukum Pusbangkom Manajemen, Capaian Pelatihan Tahun 2019, dan Kompetensi Petugas PPID.

1. Jadwal Kepala Pusat per-Tahun

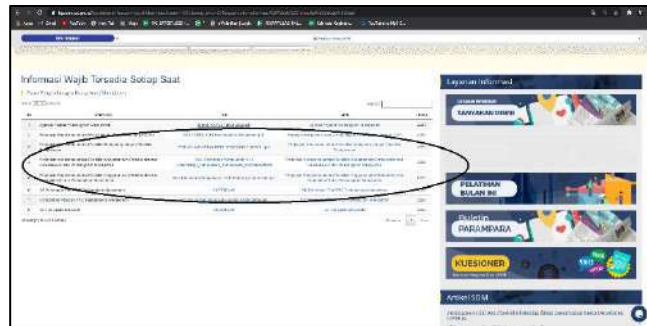
Pada *website* BPSDM terdapat Jadwal Kepala Pusat per-Tahun secara digital.

NO	TANGGAL	JUDUL	LOKASI
1	01 Januari 2020
2	02 Januari 2020
3	03 Januari 2020
4	04 Januari 2020
5	05 Januari 2020
6	06 Januari 2020
7	07 Januari 2020
8	08 Januari 2020
9	09 Januari 2020
10	10 Januari 2020
11	11 Januari 2020
12	12 Januari 2020
13	13 Januari 2020
14	14 Januari 2020
15	15 Januari 2020
16	16 Januari 2020
17	17 Januari 2020
18	18 Januari 2020
19	19 Januari 2020
20	20 Januari 2020
21	21 Januari 2020
22	22 Januari 2020
23	23 Januari 2020
24	24 Januari 2020
25	25 Januari 2020
26	26 Januari 2020
27	27 Januari 2020
28	28 Januari 2020
29	29 Januari 2020
30	30 Januari 2020
31	31 Januari 2020

Gambar 13 - Jadwal Kepala Pusat Pusbangkom Manajemen

2. Produk Hukum

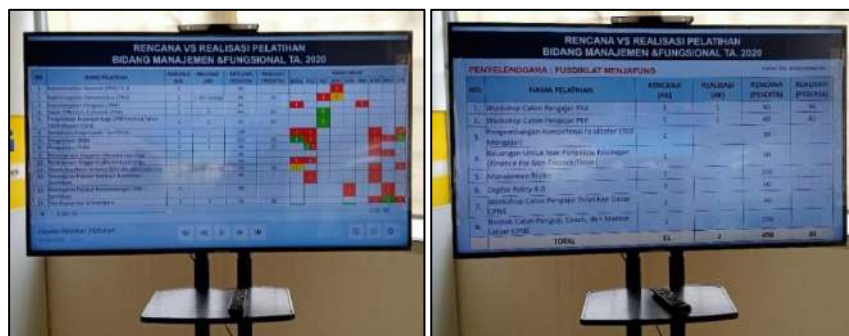
Disajikan dalam bentuk digital, produk hukum Pusbangkom Manajemen yang berupa Perjanjian Kerjasama dengan beberapa pihak terkait penyelenggaraan pelatihan dan Surat Keputusan yang mengatur bagian internal Pusbangkom Manajemen.



Gambar 14 - Produk Hukum Pusbangkom Manajemen

3. Capaian Pelatihan Tahun 2020


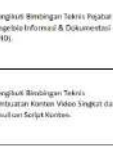


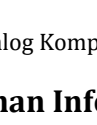
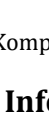
Pusbangkom Manajemen menyediakan data mengenai Capaian Pelatihan Tahun 2020 secara digital di TV Corner dalam Ruang Layanan Informasi.



Gambar 15 - Capaian Pelatihan Pusbangkom Manajemen Tahun 2020

4. Kompetensi Petugas PPID

Sebagai salah satu wujud komitmen Pusbangkom Manajemen dalam melayani pemohon, petugas PPID diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi terkait PPID dengan mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan oleh PPID BPSDM Pusat. Rinciannya ditampilkan dalam bentuk digital dan bisa diakses di *website* BPSDM.

KOMPETENSI PETUGAS PPID PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN			
No.	Nama Petugas	Kompetensi	Sertifikat
1.	Ageng Cahya Widyawati Sumartono, S.Hum	Mengikuti Bimbingan Teknis: A. Identifikasi (Perbaikan Bertindak Esasare); B. Pengelolaan Media Sosial (Instagram & Youtube); C. Pembuatan Konten Video Singkat dan Pembuatan Script Header; dan D. Pembuatan Persebaran Informasi & Dokumentasi (PPIB)	
2.	Bella Nirvana, S.E.	Mengikuti Bimbingan Teknis: Pengantar Persebaran Informasi & Dokumentasi (PPIB)	
3.	Isnan Sapthil Esthar Batun, A.Md	Mengikuti Bimbingan Teknis: Pembuatan Konten Video Singkat dan Pembuatan Script Header.	
4.	Yurcho Adnan, S.E.	Mengikuti Bimbingan Teknis: Pembuatan Konten Video Singkat dan Pembuatan Script Header.	
5.	Yulian Adhiza Rizka, S.Kom	Mengikuti Bimbingan Teknis: Pengelolaan Media Sosial (Instagram & Youtube)	
6.	Martian Syah, S. Kom	Mengikuti Bimbingan Teknis: Pengelolaan Media Sosial (Instagram & Youtube)	

Gambar 16 - Kompetensi Petugas PPID Pusbangkom Manajemen

c. Informasi Serta Merta

Saat ini, Pusbangkom Manajemen baru menyediakan Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019 sebagai salah satu informasi serta merta. Katalog tersebut bias diakses melalui *website* BPSDM.



Gambar 17 - Katalog Kompetensi, Standar Kompetensi, dan Profil Pelatihan Bidang Manajemen Tahun 2019

2.5. Kondisi Layanan Informasi Publik

Kondisi layanan informasi publik di Pusbangkom Manajemen meliputi informasi jumlah SDM dan sarana prasarana yang tersedia dan digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang saat disusunnya laporan ini telah berubah nomenklatur menjadi Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I yang menyelenggarakan layanan informasi publik secara mandiri, maka dibuatlah organisasi PPID untuk mewujudkan layanan informasi yang memadai.

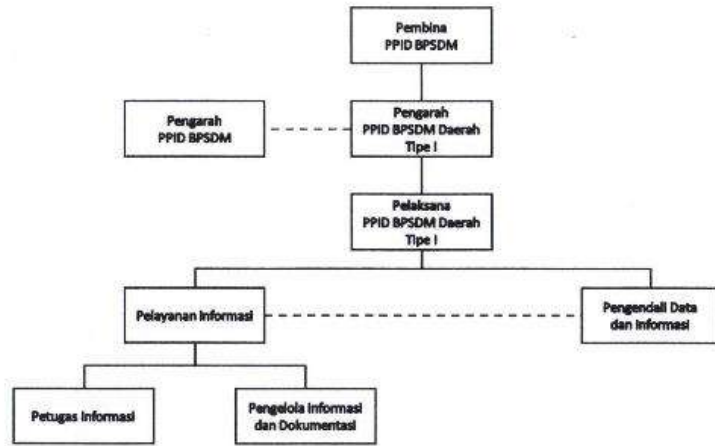
Pembentukan organisasi PPID dimulai dengan menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 105/KPTS/MF/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Kementerian PUPR. Setelah pergantian nomenklatur, struktur organisasi internal Pusbangkom Manajemen juga mengalami perubahan. Untuk itu, diterbitkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 59/KPTS/MF/2021 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

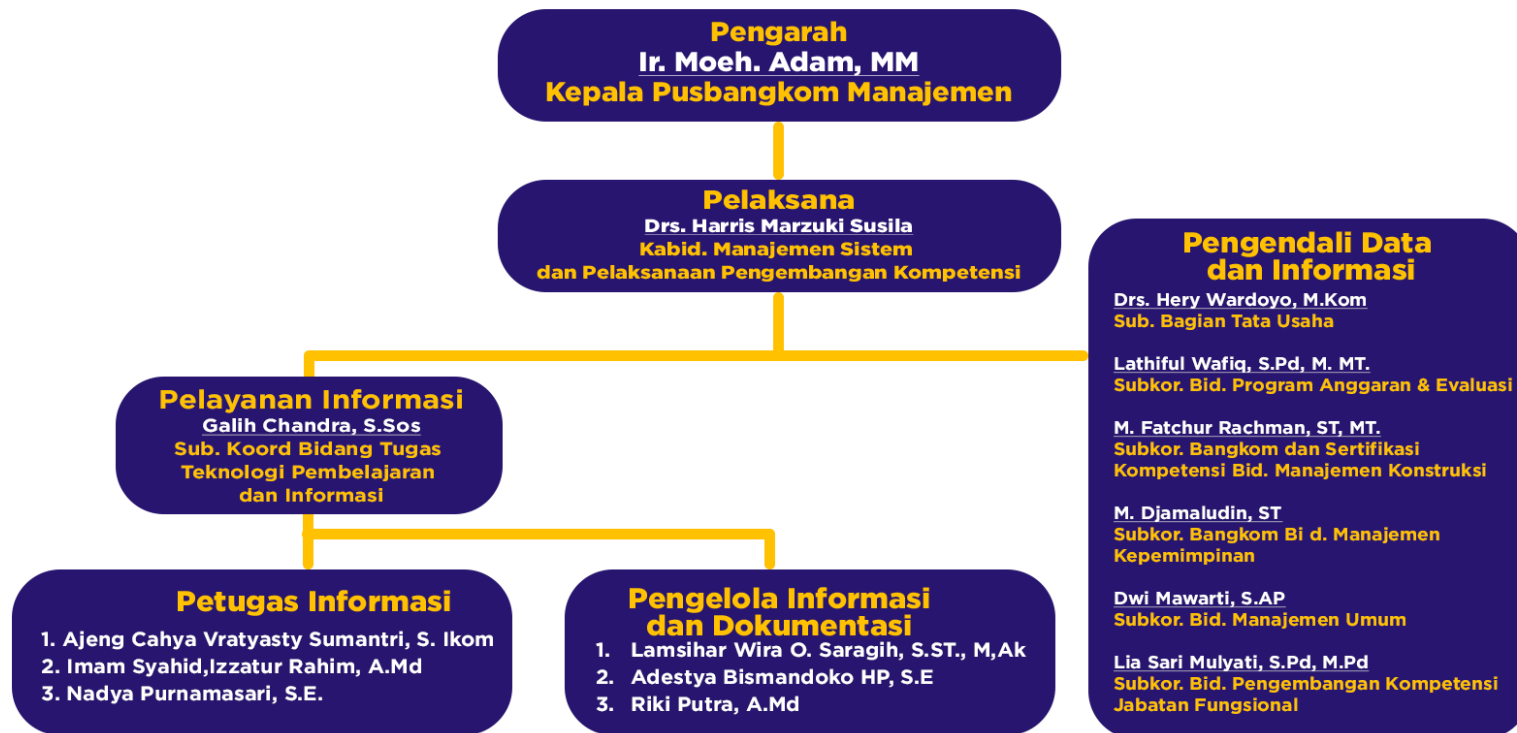
2.5.1. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 34/KPTS/KM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 84//KPTS/KM/2020 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sebagai PPID Daerah Tipe I adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 84/KPTS/KM/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH TIPE I**





Gambar 18 - Struktur Organisasi PPID Pusbangkom Manajemen sesuai SK 56/KPTS/MF/2021

Pelaksana PPID Pusbangkom Manajemen dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Pelayanan Informasi dan 5 (lima) orang Pejabat Pengendali Data dan Informasi. Di bagian Pelayanan Informasi, terdapat 7 (tujuh) orang Petugas Informasi dan 9 (sembilan) orang Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

2.5.2. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk dapat memberikan pelayanan informasi publik yang memadai, Pusbangkom Manajemen menyediakan beberapa sarana dan prasarana yang digunakan, diantaranya:

a. Ruang Layanan Informasi

Ruang Layanan Informasi Pusbangkom Manajemen terdapat di Gedung Pusbangkom Manajemen Lt. 1 dengan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan pemohon informasi. Letak nya yang strategis di dekat pintu masuk Gedung Pusbangkom Manajemen juga muda untuk diakses pemohon informasi.



Gambar 19 - Ruang Layanan Informasi Publik

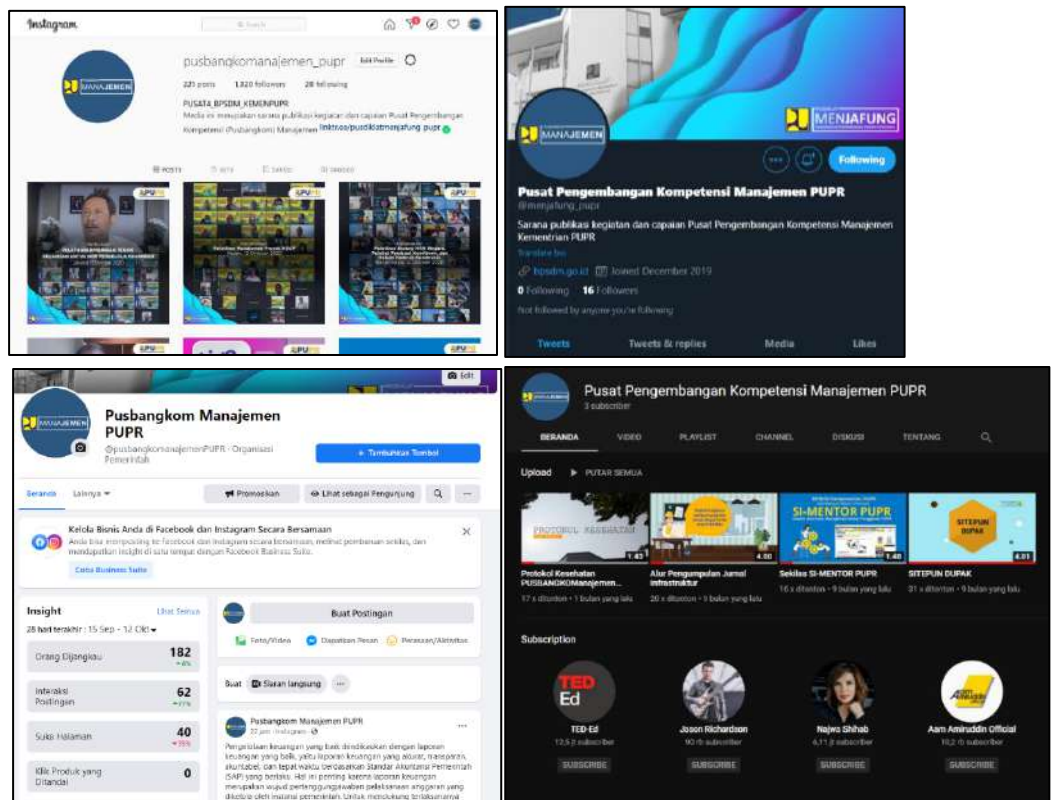


Gambar 20 - Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik

b. Media Sosial

Untuk menjangkau khalayak yang lebih banyak dan mempermudah masyarakat mengakses informasi, Pusbangkom Manajemen menggunakan media sosial sebagai salah satu media publikasi. Media sosial yang dimiliki oleh Pusbangkom Manajemen adalah Instagram (@pusbangkomanajemen_pupr), Twitter (@menjafung_pupr), Facebook (Pusbangkom Manajemen), dan Youtube (Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen).

Informasi mengenai kebijakan, pelatihan, pendidikan, dan pencapaian kinerja Pusbangkom Manajemen di publikasikan melalui media sosial tersebut. Berikut tampilan media sosial Pusbangkom Manajemen:



Gambar 21 - Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Sosial

c. TV Corner

Untuk memberikan informasi secara menghibur dan inovatif, Pusbangkom Manajemen menyediakan media berupa TV di Ruang Layanan Informasi yang menayangkan materi profil, capaian kinerja, jadwal pelatihan, bahan tayang mengenai jurnal infrastruktur, pengetahuan mengenai DUPAK, dll.



Gambar 22 - TV Corner

d. InDing (Info Dinding)

Berlokasi di dekat ruang tunggu lantai 1 Gedung Pusbangkom Manajemen, Info Dinding merupakan salah satu media yang disediakan untuk informasi Pusbangkom Manajemen dalam bentuk poster.



Gambar 23 - Info Dinding

e. X-Banner

Untuk menambah media publikasi informasi, Pusbangkom Manajemen juga menyediakan beberapa X-Banner yang berlokasi di Ruang Layanan Informasi, di samping meja resepsionis, dan disamping lift.



Gambar 24 - X-Banner

d. Alat Dokumentasi



Gambar 25 - Alat Dokumentasi

2.6. Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik

Pusbangkom Manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik juga melakukan upaya pengembangan inovasi. Hal ini diharapkan selain dapat mempermudah penyampaian informasi juga untuk menarik minat publik untuk mengakses informasi tersebut. Salah satu inovasi dalam bidang pelayanan publik yang dilakukan guna menambah variasi penyampaian informasi adalah melalui video animasi.

1. Mengemas Informasi dalam Bentuk Audio-Visual

Pusbangkom Manajemen berusaha mengemas informasi ke dalam video animasi ataupun dokumentasi dalam bentuk video yang menarik dan dilengkapi dengan Voice Over ataupun Caption sehingga mudah di mengerti.

b. Berkontribusi dengan Menulis Beberapa Draft Berita di *website* BPSDM

Berpikir Sistematis dan Analitis Terhadap Pekerjaan Konstruksi

Kamis, 01 April 2021

Palembang, 1 April 2021 – Industri konstruksi di Indonesia mengalami tumbuh dan berkembang secara pesat, peningkatan proyek terjadi pada sisi volume, teknologi, biaya, peraturan, sumber daya dan manajemen. Namun pada sisi yang lain, kegagalan bangunan menjadi salah satu masalah dalam pekerjaan konstruksi. Maka dibutuhkan tenaga ahli dalam menginvestigasi sebuah kegagalan bangunan.

Untuk memastikan tenaga ahli tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyelenggarakan Pelatihan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan (Forum Engineering) di Palembang. Pelatihan yang telah rampung dilaksanakan secara daring. Kamis (1/4) tersebut merupakan sebuah upaya untuk membentuk Tim Penilai Ahli (dengan kualitas dan kompetensi memadai).

"Kegiatan pembinaan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsi bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi," jelas Dir. Zukarnaen, Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Manajemen Umum Konstruksi dalam pidato pembukaan pelatihan.

Pengguna jasa dan penyedia jasa bisa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kondisi kegagalan bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli. Penilai Ahli dengan kemampuan tersebut perlu dibarengi di lingkungan ASN, baik di Pusat maupun di Daerah guna menangani investigasi kegagalan bangunan, khususnya di lingkungan pemerintah.

Pembentukan Penilai Ahli dari kalangan ASN dilakukan melalui suatu pelatihan kepada ASN yang memenuhi persyaratan sebagai ahli jasa konstruksi, agar dihasilkan Penilai Ahli dengan kualitas dan kompetensi yang memadai.

Mengingat dampak nya yang krusial, maka pengajar yang berasal dari Widyaiswara, Pejabat Struktural, dan praktisi/akademi berpengalaman serta ahli di bidangnya memberikan materi-materi paparan selama 47 jam Pelajaran (JP). Sebanyak 31 orang peserta pun dibekali ilmu dan peblehan yang diseleenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang ini.

Salah satu peserta yang berasal dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, Gahani Amdeu Monangin yang berhasil meraih predikat peserta terbaik pertama dengan nilai 87,41 dan predikat memuaskan, mengatakan "Dengan mengikuti pelatihan ini, tentunya dalam pekerjaan yang memang berhubungan dengan konstruksi, cara berpikir jadi lebih sistematis dan menantang kemampuan dalam analisis terhadap suatu pekerjaan konstruksi." ujarnya.

Selain Gahani, Mohammed Arditya Ramdhan yang berasal dari unit kerja yang sama, menyusul rekannya di peringkat terbaik kedua dengan nilai 84,76 dengan predikat Baik Sekali. Peserta dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga menunjukkan prestasinya, Risky Fevita Darmayanti meraih peringkat terbaik ketiga dengan nilai 84,36 predikat Baik Sekali.

BPSDM Melatih ASN Yang Mampu Menganalisis Dan Mengelola Resiko Investasi infrastruktur PUPR

Senin, 05 April 2021

Palembang, 5 April 2021 – Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas dalam mendukung pengelolaan investasi infrastruktur yang andal mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan Manajemen Resiko Investasi Infrastruktur (MRI) di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang secara daring. Senin (5/4).

Hal tersebut mengingat pembiayaan merupakan salah satu faktor pendukung untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan lancar, andi peran swasta dalam proyek penyediaan infrastruktur sangat dibutuhkan. Diharapkan target pembangunan tercapai dengan baik walaupun dalam kondisi penghematan yang dilakukan pemerintah karena berbagai faktor, salah satunya akibat pandemi COVID-19 ini.

Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto dalam pidato pembukaannya melalui konferensi video, menyampaikan "Pembiayaan itu pasti ada resikonya. Kita harus me-manajemen resiko itu sendiri. Baik dari sisi investasi di hulu, di manajemen resiko. Managem di hilirnya, di mitigasi. Keduanya akan selalu berkaitan,ungkapnya.

Salah satu upaya untuk mendorong meningkatnya investasi infrastruktur swasta tersebut adalah dengan telah diberikannya Pegeres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

Maka menurut Sugiyartanto, SDM yang mampu menganalisis dan mengelola resiko investasi infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sangat dibutuhkan guna menyiapkan proyek yang menarik untuk mendorong keikutsertaan pihak swasta.

Dengan diselenggarakan Pelatihan Manajemen Resiko Investasi Infrastruktur (MRI) diharapkan menghasilkan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan berintegritas dalam rangka mendukung pengelolaan investasi infrastruktur yang andal.

Selain itu, sebanyak 28 peserta pelatihan yang cukup signifikan juga menjadi perhatian Sugiyartanto. Dimulai dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Pembayaran Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Balai Jalan, dan lainnya. Diharapkan pelatihan ini akan berlangsung dengan baik dan lancar selama enam hari atau 33 jam Pelajaran (JP) hingga 10 April mendatang. Para pengajar/Widyaiswara, akademisi, dan praktisi yang berkompeten di bidangnya pun sudah siap memberikan materi pada para peserta.

BPSDM Melatih ASN Guna Pahami Seluk Beluk Penyelenggaraan KPBU

Senin, 05 April 2021

Jakarta, 5 April 2021 – Guna menjalankan proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mumpuni, dibutuhkan pemahaman atas skema KPBU itu sendiri dan mampu melaksanakan proses kerjasama dengan badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku. Maka, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan KPBU secara daring di Jakarta, Senin (5/4).

Telah disusunnya program-program prioritas terkait pembangunan infrastruktur, memacu Pemerintah untuk berinovasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur di suatu wilayah/daerah tanpa harus membentasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan melihat adanya potensi di suatu wilayah yang menarik dan dapat dikembangkan, Kementerian PUPR melakukan inovasi pembiayaan Non-APBN melalui KPBU.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJP), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

"KPBU dianggap menjadi salah satu solusi efektif yang mampu memberikan manfaat berupa pemenuhan financial gap, percepatan penyediaan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi & wilayah sehingga mampu berkontribusi pada pelayanan tenaga kerja serta adanya pemanfaatan nilai uang melalui pembagian risiko, pengelolaan aset yang bernilai, serta adanya inovasi pembiayaan & teknologi sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa," ujar Kepala Pusbangkom Manajemen, Moh. Adan pada pidato pembukaannya.

Maka selaku penentu kebijakan pembiayaan infrastruktur, ASN Kementerian PUPR harus memiliki pemahaman yang baik terkait seluk beluk penyelenggaraan KPBU. Untuk itu, dengan diselenggarakan Pelatihan KPBU diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ASN terkait skema KPBU dan mampu melaksanakan proses kerjasama (alur, mekanisme, dan tata cara) dengan badan usaha berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Sebanyak 25 orang peserta akan menjalani pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Jakarta ini hingga 9 April mendatang. Selama 30 jam Pelajaran (JP), pelatihan diisi oleh pengajar berpengalaman dan ahli dibidangnya yang berasal dari Widyaiswara, Direktorat Pengembangan Sistem & Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, dan Direktorat Pembayaran Infrastruktur yang akan menyampaikan materi terkait KPBU secara daring.

BPSDM Tingkatkan Pengajar yang Berkualitas Untuk Keberhasilan Pelatihan

Rabu, 07 April 2021



Jakarta, 7 April 2021 - Pengajar merupakan salah satu aspek penting dalam berhasilnya suatu pelatihan. Kompetensi pengajar yang unggul dalam teknik dan metode mengajar tentu sangat diperlukan. Maka, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator di Jakarta, Senin (7/4) secara tatap muka dan daring sebagai upaya memenuhi hal tersebut.

Kompetensi pengajar yang unggul tidak terlepas dari upaya untuk menjawab tantangan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur. SDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, terus belajar, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pun munculi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri sipil mengamanatkan bahwa untuk mendukung keberhasilan suatu pelatihan, pengajar sebagai salah satu komponen penting dalam sebuah pelatihan pun dibutuhkan kualitasnya, selain kurikulum, sarana dan prasarana dan pembiayaan.

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Moeh Adam menegaskan bahwa "kualitas pengajar adalah salah satu aspek utama terhadap keberhasilan suatu pelatihan. Setiap pengajar harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik sebagai fasilitator pembelajaran dalam pelatihan sehingga peserta meningkatkan kompetensinya".

Pelatihan yang akan berlangsung hingga 9 April 2021 mendatang ini, merupakan solusi dari keterbatasan jumlah Widyaiswara (pengajar) dalam sebuah lembaga pengembangan kompetensi. Sehingga peran sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis tertentu dimanfaatkan dan dibekali satu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pengajar (fasilitator) melalui pelatihan yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN) ini.

Sebanyak 26 orang peserta akan melaksanakan dua hari pembelajaran secara daring dan satu hari secara tatap muka untuk peserta berdomisili di Jabodetabek dengan total 29 jam Pelajaran (JP). Materi pembelajaran akan disampaikan oleh 6 orang Widyaiswara yang berasal dari LAN.

Pengajar PUPR Ditingkatkan Kompetensinya Agar Pelatihan Menjadi Efektif dan Efisien

Jumat, 09 April 2021



Jakarta, 9 April 2021 - Didalam pelatihan, peningkatan kompetensi peserta diharapkan dapat sesuai dengan sasaran kompetensinya. Maka, penyampaian materi oleh para fasilitator pembelajaran juga harus dengan metode yang tepat. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator yang telah berhasil diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen, Jumat (9/4) di Jakarta, merupakan upaya untuk memenuhi hal tersebut.

"Kompetensi pengajar/fasilitator sangat diperlukan baik dalam penguasaan teknik dan metode mengajar, maupun substansi materi pelatihan," ujar Moeh Adam, Kepala Pusbangkom Manajemen dalam pidato penutupannya.

Adam menambahkan, kompetensi penguasaan materi, ketepatan waktu, sistematis penyajian, penguasaan metode dan alat bantu, daya simpati, gaya dan sikap, penggunaan bahasa dan volume suara, pemberian motivasi belajar, kesempatan tanya jawab, dan pencapaian tujuan instruksional merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh seorang fasilitator baik Widyaiswara maupun Non Widyaiswara.

Menurut pelatihannya, Adam menyampaikan harapannya agar para peserta bisa terinspirasi & termotivasi untuk terus belajar, berkolaborasi, dan meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi pembelajaran dalam suatu pelatihan.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu peserta yang merupakan Widyaiswara Utama Badan Pengembangan SDM, Danis Hidayat Sembudaga menyampaikan apa saja yang dapat diserap dari pelatihan ini, "Bagaimana agar proses pelatihan itu efektif dan efisien itu banyak hal yang mempengaruhi. Bagaimana kita mempersiapkan bahan dengan baik, cara berkomunikasi dengan baik, metode (metode penyampaiannya, me-manage kelas, persentasinya, dan sebagainya," ungkap Danis.

Dengan difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), pelatihan ini ditutup secara tatap muka untuk peserta yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan secara daring untuk yang di luar Jabodetabek. Melalui pelatihan ini, para peserta telah dibekali materi mengenai Pembelajaran Orang Dewasa, Manajemen Kelas, Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelajaran & Rencana Pelajaran (RMP-RP), Media Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Simulasi Mengajar/Micro Teaching dengan total 29 jam Pelajaran (JP). Adapun saat berakhirnya pelatihan ini, dilakukan 25 orang peserta masih dalam proses penilaian.

Jakarta, 9 April 2021 - Pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen berakhir pada Jumat (9/4) di Jakarta. Berjalan sejak 5 April 2021 lalu, pelatihan ini merupakan salah satu upaya BPSDM dalam membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hal KPBU agar dapat mencapai target prioritas pembangunan infrastruktur yang амal.

Infrastruktur yang handal merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Kemandirian infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa. Pemerintah, melalui Kementerian PUPR selaku kementerian yang bergerak di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Pemerintah telah menyusun program-program prioritas terkait pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah/daerah tanpa harus membebani pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya terbatas dan dengan melihat adanya potensi di suatu wilayah yang menarik dan dapat dikembangkan, maka hal yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah dengan melakukan inovasi pembiayaan non-APBN melalui penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Melalui pidato penutupannya, Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh Adam berpesan, "Selaku penentu kebijakan pembiayaan infrastruktur, ASN Kementerian PUPR harus memiliki pemahaman yang baik terkait seluk beluk KPBU".

"KPBU dianggap menjadi salah satu solusi efektif yang mampu memberikan manfaat berupa pemenuhan financial gap, percepatan penyediaan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan wilayah sehingga mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan adanya pemanfaatan nilai uang (value for money) melalui pembagian risiko, pengelolaan aset yang bernilai, serta adanya inovasi pembiayaan dan teknologi sehingga dapat semakin meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan global yang semakin ketat," jelas Adam.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Jakarta dengan pengajar berpengalaman & ahli di bidangnya dikerahkan selama 30 jam Pelajaran (JP). Sehingga 28 orang peserta dapat fokus dengan baik setelah dibekali materi mengenai: Ceramah KPBU, Dasar-Dasar KPBU, Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Kolaborasi KPBU, Manajemen Risiko & Rencana Usaha, Monitoring & Evaluasi KPBU, Pelaksanaan KPBU: Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender, Seminar, dan Studi Kasus.

Tiga orang peserta meraih nilai terbaik, yaitu Agus Nefo, S.S, M.T, dari Subdirektorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan & Evaluasi terbaik pertama; Firman Permana Wandani, S.T., M.PP dari Balai Pelaksanaan Jalan Banten terbaik kedua; dan terbaik ketiga Nurul Ainy Gumilar, S.E., M.T, dari Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi.

Adam menutup pidato-nya dengan harapan bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait skema KPBU dan mampu melaksanakan proses kerjasama dengan badan usaha berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Jakarta, 5 April 2021 - Guna menjalankan proses Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mumpuni, dibutuhkan pemahaman atas skema KPBU itu sendiri dan mampu melaksanakan proses kerjasama dengan badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku. Maka, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan KPBU secara daring di Jakarta, Senin (5/4).

Telah dasaunya program program prioritas terkait pembangunan infrastruktur, memicu Pemerintah untuk berinovasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur di suatu wilayah/daerah tanpa harus membebani pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan melihat adanya potensi di suatu wilayah yang menarik dan dapat dikembangkan, Kementerian PUPR melakukan inovasi pembiayaan Non-APBN melalui KPBU.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PPJK) yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan meminimalkan pembagian risiko antara para pihak.

"KPBU dianggap menjadi salah satu solusi efektif yang mampu memberikan manfaat berupa pemenuhan financial gap, percepatan penyediaan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan wilayah sehingga mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta adanya pemanfaatan nilai uang melalui pembagian risiko, pengelolaan aset yang bernilai, serta adanya inovasi pembiayaan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa," ujar Kepala Pusbangkom Manajemen, Moeh Adam pada pidato pembukaannya.

Maka selaku penentu kebijakan pembiayaan infrastruktur, ASN Kementerian PUPR harus memiliki pemahaman yang baik terkait seluk beluk penyelenggaraan KPBU. Untuk itu, dengan diselenggarakan Pelatihan KPBU diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ASN terkait skema KPBU dan mampu melaksanakan proses kerjasama (alur, mekanisme, dan tata cara) dengan badan usaha berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Sebanyak 35 orang peserta akan menjalani pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Jakarta ini hingga 9 April mendatang. Selama 30 jam Pelajaran (JP), pelatihan diisi oleh pengajar berpengalaman dan ahli dibidangnya yang berasal dari Widyaiswara, Direktorat Pengembangan Sistem & Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, dan Direktorat Pembiayaan Infrastruktur yang akan menyampaikan materi terkait KPBU secara daring.

Meminimalisir Berbagai Risiko, BPSDM Selenggarakan Workshop Manajemen Risiko

Rabu, 14 April 2021

53



Jakarta, 14 April 2021 – Di dalam pelaksanaan tugas membangun infrastruktur dan mengelola APBN dengan anggaran terbesar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki berbagai risiko, antara lain risiko keuangan, risiko reputasi, risiko fraud/kecurangan, risiko hukum, risiko kecelakaan kerja, risiko syanan dan risiko kinerja. Untuk meminimalisir berbagai risiko tersebut, Kementerian PUPR menajaga setiap pekerjaan yang dilakukan melalui manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR harus dilaksanakan secara komprehensif dan memiliki bagi peran yang jelas, antara Sather sebagai *1st line of defense*, Unit Kaputuhan Intern (UKI) sebagai *2nd line of defense* dan Inspektur Jenderal sebagai *3rd line of defense*. Mula untuk memetakan peran antar 3 lini tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen bekerja sama dengan Pusdiklatkwas BPJK menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko Angkatan Ke-11.

Dalam melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif, di Kementerian PUPR telah diterbitkan SE Menteri PUPR No.04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR yang bertujuan untuk menyeragamkan penerapan manajemen risiko yang menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran serta meningkatkan kinerja di Kementerian PUPR.

"Sebenarnya bukan hanya manajemen risiko, tentunya ada mitigasi risiko. Kalau manajemen risiko ini mengenal risiko, tahu risikonya baik risiko keuangan, risiko pelaksanaan, dsb," ungkap Kepala BPSDM PUPR, Sugiyantanto dalam sambutan pembuka workshop, Senin (14/4).

Untuk itu, Sugiyantanto menambahkan dengan penyelenggaraan Workshop Manajemen Risiko Angkatan ke-11 yang melibatkan peserta dari berbagai level ini diharapkan tidak menimbulkan disarbitasi dalam pemahaman manajemen risiko dan mitigasi risiko sesuai core bisnis Kementerian PUPR.

"Upaya pemahaman di dalam penerapan manajemen risiko dari bagaimana mitigasi risiko, ini yang paling penting. Dengan mengenal core bisnisnya masing-masing, maka tahu akan ada risiko. Dari hal itu sejak penyusunan program sampai risiko di dalam pelaksanaan," tambah Sugiyantanto.

Untuk itu, dengan diselenggarakannya Workshop Manajemen Risiko Angkatan ke-11 ini diharapkan para peserta mampu menerapkan manajemen risiko sesuai SE Menteri PUPR No.04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.

Dengan fasilitas Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Jakarta, Workshop Manajemen Risiko Angkatan ke-11 akan berlangsung mulai tanggal 14 s.d 27 April 2021 dengan metode *on off campus*. Dikuti sebanyak 30 peserta yang berasal dari para pelaksana di unit kerja/satker dan Unit Kaputuhan Intern (UKI) di lingkungan Ditjen Bina Marga, BFW, BPSDM, serta auditor dari Inspektur Jenderal, (Kompu BPSDM).

BPSDM PUPR Mutakhirkan Kurikulum dan Modul Untuk Keberhasilan Pelatihan

Jumat, 16 April 2021

47



Tangerang, 16 April 2021 – Sebagai salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan suatu pelatihan yakni modul pelatihan, haruslah valid, terkini, menarik, dan mudah dipahami. Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kurikulum Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Tangerang, Jumat (16/4) secara tatap muka dan daring.

Dalam pidato pembukaannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen diwakili oleh Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Haris Marzuki Susila menyampaikan, "Pusbangkom Manajemen sebagai pembina pelatihan bagi ASN bidang PUPR khususnya di bidang manajemen berkontribusi untuk mengembangkan kurikulum dan modul pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang sudah ada sebelumnya untuk direvisi dan dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan regulasi dan isu terbaru, serta penyesuaian metode pembelajaran terkait dengan kondisi pandemi Covid-19."

Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dari persiapan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan mengenai substansi kurikulum pelatihan yang sedang dikembangkan yang meliputi Rancangan, Bangun Pembelajaran (RBP) dan Rencana Pembelajaran (RP).

Adapun pemeriksaan/pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bertujuan untuk menjaga tercapainya tmbng penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi baik fisik maupun non fisik meliputi aspek perencanaan konstruksi, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontrak di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

FGD ini dihadiri oleh beberapa Unit Organisasi terkait yang meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Sekretariat Ditjen Bina Marga, Sekretariat Ditjen Cipta Karya, Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi, Sekretariat Ditjen Perumahan, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Praktisi-praktisi berkualitas dan berpengalaman seperti Srie Handono Mashudi, Alex A. Chalik, Hasan Basri, dan , Kepala Persatuan Asosiasi Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKK), Lazuardi Nuridin juga turut andil dalam memberikan masukan kepada para penyusun modul.

Pengelolaan SDM Sebagai Unsur Vital Dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi

Senin, 19 April 2021

29



Surabaya, 19 April 2021 – Sebagai unsur vital dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu menjadi perhatian. Untuk itu, demi menyamakan persepsi seluruh lini unit kerja mengenai pengelolannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (MPSDM) di Surabaya, Senin (19/4) secara daring.

"Salah satu bentuk pengelolaan SDM yang paling penting adalah terkait pengembangan kompetensi SDM," ungkap Kepala Pusbangkom Manajemen, Moch. Adam dalam pidato pembukaannya. "Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan agar Bapak/Ibu memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan, strategi hingga implementasi pengembangan SDM di lingkungan Kementerian PUPR sehingga dapat menyelaraskan implementasinya di unit kerja Bapak/Ibu selalain," tutup Adam.

"Pengembangan SDM yang dimaksud, tidak hanya melalui pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan akan tetapi juga mencakup pengembangan karier individu, pengembangan kinerja serta perencanaan sukses," tambah Adam.

Seperi kita ketahui, untuk meningkatkan kualitas SDM serta kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam mencapai visi dan misi organisasi, maka dilakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi bagi ASN. Hal tersebut sejalan dengan amanah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kemampuan untuk mengembangkan kompetensinya.

Diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah VI Surabaya, pelatihan ini akan berlangsung selama lima hari hingga 23 April 2021 mendatang. Dengan total 33 Jam Pelajaran, sebanyak 38 peserta akan dibekali berbagai materi, yaitu Kebijakan Pengembangan SDM Keman. PUPR; Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, & Pengarusutamaan Gender; Konsep Manajemen Kinerja, Konsep Manajemen & Sukses; Konsep Perilaku Kompetensi; Konsep Pengembangan Kompetensi; Konsep Manajemen Karir; Konsep Manajemen Talenta; dan Implementasi Pengembangan SDM di Kementerian PUPR.

Tingkatkan Kompetensi Pengelola Aset Negara, BPSDM PUPR Selesaikan Pelatihan Pengelolaan BMN

Rabu, 21 April 2021

10



Medan, 21 April 2021 – Mengemban amanah untuk mengelola aset negara dengan efektif, transparan, dan jujur tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Diadakannya Pelatihan Pengelolaan BMN di Medan pada 12 April lalu hingga 20 April 2021 melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen merupakan upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) untuk mewujudkan hal tersebut.

Kementerian PUPR dibarengi kepercayaan untuk mengelola APBN dengan anggaran terbesar, tidak itu Kementerian PUPR juga memiliki kewajiban untuk mengelola aset negara yang berwujud di lingkup Kementerian PUPR.

"Pengelolaan aset negara dalam hal ini meliputi kegiatan, perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan," jelas Ahmad Kholidi Nasution, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi (Bangkom) PUPR Wilayah I Medan pada penutupan pelatihan, Selasa (20/4).

Pengelolaan BMN saat ini memiliki berbagai masalah yang semakin kompleks dalam pelaksanaannya. Antara lain adanya proses penyerahan BMN yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah (Pemda) yang berlanjut lanjut dengan nilai yang cukup tinggi. Selain itu masalah dalam pengelolaan BMN juga masih dijumpai adalah ketika pada proses penyusunan laporan BMN ditemukan adanya selisih antara nilai buku dan uang. Oleh karena itu, pelatihan Pengelolaan BMN diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para pengelola BMN di lingkungan Kementerian PUPR.

Tertinggi 22 orang peserta telah berhasil lulus pada pelatihan yang diselenggarakan Balai Pengembangan Kompetensi (Bangkom) PUPR Wilayah I Medan ini. Sebanyak 2 orang lulus dengan predikat Memuaskan, 26 orang lulus dengan predikat Baik Sekali, 1 orang lulus dengan predikat Baik, dan 1 orang dinyatakan Tidak Lulus.

Dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh, para peserta telah dibekali materi dengan total 40 jam Pelajaran (JP) yang meliputi Pengenalan dan Kebijakan Pengelolaan BMN Perencanaan dan Penganggaran BMN; Penggunaan dan Pemeliharaan BMN; Pengendalian BMN; Peningkatan Integritas; Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender; serta Sistem Akutansi dan Pelaporan BMN.

Dengan berbagai materi yang diberikan dalam pelatihan, tentunya banyak ilmu dan pengetahuan yang didapat. Hal ini pula juga diuraikan Suhaemi, salah satu peserta pelatihan yang berasal dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya. "Dari pelatihan ini saya dapat banyak sekali ilmu dengan materi yang lengkap dan runtut dari yang *Big frame Work* sampai dengan yang detail," ungkap Suhaemi.

BPSDM PUPR Selesaikan Pelatihan Manajemen Pengembangan SDM

Jumat, 23 April 2021



Surabaya, 23 April 2021 – Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan penting atas keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka untuk meningkatkan kualitas SDM serta mengembangkan kompetensi bagi ASN sehingga dapat memberi kontribusi optimal dalam mencapai visi dan misi organisasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen telah menyelesaikan Pelatihan Manajemen Pengembangan SDM di Surabaya, Jumat (23/4).

Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusbangkom Manajemen, Haris Marzuki Susila dalam sambutan sekaligus menutup pelatihan secara daring mengatakan, "Salah satu bentuk pengelolaan SDM yang paling penting adalah terkait pengembangan kompetensi SDM," ungkap Haris.

Haris menambahkan, pengembangan kompetensi SDM yang dimaksud, tidak hanya melalui pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan akan tetapi juga mencakup pengembangan karier individu, pengembangan kinerja serta perencanaan sukses.

Untuk itu pelatihan Manajemen Pengembangan SDM ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR untuk mengembangkan kompetensi para pengelola SDM di Kementerian PUPR. Dengan terselenggaranya pelatihan ini diharapkan para peserta akan memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam pengelolaan SDM di unit kerjanya masing-masing.

Diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah VI Surabaya selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 19 s.d 23 April 2021 dengan metode pembelajaran jarak jauh, para peserta pelatihan Pelatihan Manajemen Pengembangan SDM ini telah dibekali materi mengenai penilaian kompetensi, manajemen talenta, manajemen sukses, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan kompetensi.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dari unsur-unsur yang dinilai yakni akademik, substansi dan sikap perilaku, dari 37 orang peserta yang mengikuti pelatihan, sebanyak 30 orang peserta dinyatakan lulus pelatihan. Adapun tiga orang peserta memperoleh peringkat terbaik, yakni: peringkat terbaik pertama diraih oleh Asta Nova Ma' ssem dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nilai 88,33; peringkat terbaik kedua diraih oleh Annisa Tasya Azhari dari Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan nilai 87,00; dan peringkat terbaik ketiga diraih oleh Pops Nikmawati dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan nilai 86,60.

Workshop Manajemen Risiko Untuk Mengawal Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Selasa, 27 April 2021



Jakarta, 27 April 2021 – Penyelenggaraan Workshop Manajemen Risiko yang dimulai pada 14 April lalu ditutup hari ini, Selasa (27/4), secara tatap muka di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah III Jakarta. Melalui kegiatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengayak agar manajemen risiko di Kementerian PUPR dapat terlaksana secara komprehensif untuk mengawal pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam pidato penutupannya, Sekretaris BPSDM Herman Suryo mengatakan, "Penerapan manajemen risiko mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR harus dilaksanakan secara komprehensif dan memiliki bagi peran yang jelas antara 1st line, 2nd line, dan 3rd line." Herman juga mengatakan bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Kementerian PUPR telah diterbitkan SE Menteri PUPR No.04/SEM/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR dengan tujuan untuk menyalurkan penerapan manajemen risiko yang menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran serta meningkatkan kinerja di Kementerian PUPR.

"Dengan mengikuti Workshop ini, saya bisa mengetahui semua tahapan pada manajemen risiko sesuai SE (Surat Edaran) Menteri PUPR 4 Tahun 2021. Sehingga dalam semua tahapan, pekerjaan dapat mengendalikan risiko yang terjadi," ujar Eka Setiawan, salah satu peserta yang berasal dari Pusbangkom Manajemen BPSDM Kementerian PUPR.

Workshop ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen, dimana sebanyak 30 peserta dinyatakan lulus seluruhnya. Tenaga pengajar ahli yang berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan paparan orien selama 10 hari dengan total 47 jam Pelajaran (JP).

Adapun 3 orang peserta terbaik pada kegiatan ini, yaitu Rechenawati Peranti Susidyaning dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebagai terbaik pertama, dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPW) dengan terbaik kedua diraih oleh Brian Asmara, dan terbaik ketiga diraih oleh Nurbaeti dari BPSDM. Sedangkan untuk kelompok terbaik bernilai diraih kelompok 1 dari Ditjen Bina Marga.

29 Peserta Lulus Pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi

Selasa, 27 April 2021



Jakarta, 27 April 2021 – Sejalan dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka sektor pembiayaan konstruksi menjadi instrumen yang penting. Proses pengajuan proyek konstruksi menuntut lebih efisien dan efektif sehingga penyediaan infrastruktur bisa tepat waktu dan infrastruktur yang dibangun berkualitas tinggi.

Menyikapi hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom Manajemen secara resmi telah menyelesaikan Pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi di Jakarta, Selasa (27/4).

Dengan difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah III Jakarta, pelatihan ini telah berlangsung sejak tanggal 19 April hingga 27 April 2021 dengan metode *distance learning*. Sebanyak 29 peserta dinyatakan lulus dalam pelatihan ini. Adapun tiga orang peserta meraih peringkat terbaik, yakni: Meisya Manunggal dari Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya di peringkat pertama; Aceh Atmaja dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air di peringkat kedua; dan Andrew Nugraha Standiyanto dari Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga di peringkat ketiga.

Dalam sambutan penutup Kepala Pusbangkom Manajemen yang dibacakan oleh Koordinator Bidang Teknik dan Materi Manajemen Umum Konstruksi, Dik Zulkarnain mengatakan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, pembangunan di bidang konstruksi menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan efektif, salah satunya dalam sektor pembiayaan konstruksi.

Namun Diki menambahkan bahwa sangat disadari bahwa dalam pelaksanaan tertib penyelenggaraan pembiayaan konstruksi masih banyak ditemui masalah.

"Maka sebagai konsekuensinya, seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi saat ini perlu melakukan proses perencanaan yang meliputi penghitungan Harga Satuan Dasar Upah, Harga Satuan Dasar Alat dan Harga Satuan Bahan, dimana ketiganya akan menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) yang akurat sebagaimana yang telah diamankan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi," ungkap Diki.

Untuk itu, guna mendukung pelaksanaan tertib penyelenggaraan pembiayaan konstruksi tersebut, dibutuhkan SDM yang kompeten dalam hal perencanaan dan penyusunan estimasi biaya konstruksi. Maka dengan terselenggaranya pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi ini diharapkan dapat dihasilkan SDM bidang Konstruksi yang kompeten dan berintegritas dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur bidang konstruksi yang andal. (Kompu BPSDM)

Tingkatkan Kompetensi Pengelola Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Melalui Pelatihan

Senin, 03 Mei 2021

62

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Barjarmasin, 3 Mei 2021 – Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sampai saat ini masih merupakan salah satu sumber pembiayaan yang cukup penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri menjadi hal yang perlu diperhatikan karena mempengaruhi efektivitas pinjaman luar negeri. Untuk itu para pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bekerja di bagian pengelolaan PHLN perlu memahami secara lebih baik mengenai kebijakan pembiayaan pinjaman luar negeri.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN) secara *distance learning* dengan difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin, Serin (3/5).

Dalam sambutan Kepala Pusbangkom Manajemen dalam pembukaan pelatihan yang dibacakan oleh Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Heris Marzuki Susilo mengatakan PHLN yang diupayakan pemerintah merupakan salah satu bentuk penerimaan dari luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. PHLN diperlukan karena sumber-sumber dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh investasi.

"Pendayagunaan dan pengendalian dana bantuan luar negeri mulai diperlukan untuk menjaga stabilitas struktur pembiayaan pembangunan," ungkap Heris.

Sumber dana luar negeri saat ini masih diperlukan karena merupakan sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak menarik bagi sektor swasta seperti pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan prasarana di lokasi yang kurang menarik dari perspektif investasi swasta.

Heris selanjutnya mengatakan, "Pemanfaatan pinjaman luar negeri diharapkan dapat berperan dalam memacu tumbuhnya investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pinjaman luar negeri tidak semata-mata ditujukan untuk menutup defisit (*financing gap*) saja, namun juga dilaksanakan dalam kerangka kerja sama pembangunan," tambah Heris.

Maka mengingat pentingnya Pengelolaan PHLN ini, para pengelola PHLN di Kementerian PUPR perlu memahami secara lebih baik mengenai kebijakan pembiayaan pinjaman luar negeri, memahami bagaimana mengidentifikasi perbedaan karakteristik tiap tender, memahami secara lebih baik mengenai siklus pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri yang dimulai dari pengorganisasian pengelolaan PHLN, proses pengadaan barang dan jasa, manajemen kontrak, mekanisme penarikan dana serta mekanisme pengalihan pinjaman luar negeri dan bagaimana proses monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah luar negeri.

Untuk itu melalui Pelatihan Pengelolaan Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN) selama lima hari ke depan mulai tanggal 3 s.d 7 Mei 2021, sebanyak 35 ASN Kementerian PUPR akan ditingkatkan kompetensinya oleh para pengajar yang kompeten dan berpengalaman di bidang pengelolaan PHLN luar negeri. (Kompu BPSDM)

Penyempurnaan Katalog Kompetensi Guna Efektivitas Pengembangan Kompetensi

Kamis, 04 Mei 2021

46

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Bagor, 4 Mei 2021 – Setelah mengadakan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (IKPK) guna menganalisis kebutuhan pelatihan, sebagai upaya untuk mendukung pengembangan berbasis kompetensi yang efektif, Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan *Focus Group Discussion* Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Konstruksi secara tetap muka dan daring di Bagor, Kamis (4/5).

Beberapa hal seperti level kompetensi pada kompetensi umum dan konstruksi, penjelasan gap kompetensi secara umum, serta menguraikan pedoman dan rencana pengembangan kompetensi menjadi hal yang diperhatikan dalam kegiatan yang akan berlangsung pada 6 s.d 7 Mei 2021 mendatang.

"Katalog pengembangan kompetensi manajemen perlu segera disusun atau segera di sempurnakan karena ini akan jadi prioritas dalam penyusunan e-HRD," ungkap Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusbangkom Manajemen, Heris Marzuki Susilo pada pidato pembukaannya.

Untuk diketahui adikasi *Human Resource Development* (e-HRD) merupakan program strategi BPSDM. e-HRD dibangun dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di BPSDM, sehingga seluruh proses pengembangan SDM dapat terintegrasi dalam satu aplikasi. Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya e-HRD ini yakni adanya profil pengembangan kompetensi SDM yang menggambarkan portofolio pegawai yang nantinya akan disampaikan ke Badan Talenta Nasional.

Untuk itu Heris berharap dengan terselenggara PGD Penyusunan Katalog Pengembangan Kompetensi Teknis Konstruksi akan didapat masukan dari para narasumber yang kompeten di bidangnya sehingga Pusbangkom Manajemen dapat menyusun dan menginisiasi Pedoman Katalog Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri PUPR No. 07 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Teknis PUPR, dan Perka LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Sebanyak 11 orang Tim Penyusun akan diberi masukan oleh para Narasumber, yakni Direktur Keberlanjutan Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi PUPR, Kimron Manik; Pembina Jasa Konstruksi Utama, Mochammad Natsir; dan Komisaris Utama PT. Optima Talenta Performa Indonesia, Nina Insania K. Permiana.

Menyamakan Persepsi Tentang Penerapan Manajemen Risiko, BPSDM Selenggarakan Workshop

Rabu, 19 Mei 2021

43

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Jakarta, 19 Mei 2021 – Guna meminimalisir berbagai risiko yang muncul saat melaksanakan tugas untuk membangun infrastruktur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen melakukan upaya melalui Workshop Manajemen Risiko secara tetap muka yang diadakan di Jakarta, Rabu (19/5).

Sebanyak 27 orang peserta yang berasal dari dari satuan kerja sebagai *1st line of defense*, Unit Keputusan Intern (UKI) sebagai *2nd line of defense*, dan Inspektorat Jenderal sebagai *3rd line of defense* di Kementerian PUPR mengikuti kegiatan yang berlangsung hingga 3 Juni mendatang.

Sebagai lini penggerak organisasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menanggulangi risiko yang ada menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Berbagai risiko tersebut antara lain risiko keuangan, risiko reputasi, risiko *fraud*/kecurangan, risiko hukum, risiko ketidakefektifan kerja, risiko layanan, dan risiko kinerja perlu di minimalisir melalui beberapa tahap. Mulai dari penyienggaraan pekerjaan strategis, identifikasi risiko, analisis atau pengukuran risiko, evaluasi risiko, serta respon risiko.

Di terbitkannya Surat Edaran Menteri PUPR No.04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR menjadi acuan dalam penyerasaman persepsi mengenai penerapan manajemen risiko yang menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran serta meningkatkan kinerja di Kementerian PUPR.

"Bukan hanya menerima surat edaran (Surat Edaran Menteri PUPR No.04/SE/M/2021) itu, tetapi juga apa isi dan maknanya yang harus bisa di implementasikan dari sisi bagaimana mengelola risiko," ujar Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto pada pidato pembukaannya.

Dengan peserta yang berasal dari 3 lini di Kementerian PUPR ini, Sugiyartanto berharap didapat pemahaman yang sama dalam menerapkan manajemen risiko sesuai SE Menteri PUPR No.04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR.

Selain itu untuk menasikan pemahaman yang sama, Sugiyartanto berharap kedepan bagi satker-satker di daerah dapat memperoleh pelajaran manajemen risiko di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. "Moga moga ini juga bisa serentak sekaligus pemahaman kita *in-line* mengalir dari pemahaman kebijakan pimpinan sampai dengan implementasi. *Automatically* kalau sistem ini telah diangkat keberhasilannya tinggi, otomatis pelaksanaan yang namanya manajemen risiko akan berhasil!" tambah Sugiyartanto.

Workshop kali ini merupakan Workshop Manajemen Risiko angkatan ke-III, setelah sebelumnya dilaksanakan Workshop Manajemen Risiko angkatan ke-I pada 17 s.d 30 Maret 2021 dengan peserta berasal dari Inspektorat Jenderal, Unit Organisasi Ditjen SDA, Ditjen Pemayangan Infrastruktur PUPR dan Ditjen Perumahan dan Workshop Manajemen Risiko angkatan ke-II yang dilaksanakan pada pada tanggal 14 s.d 17 April 2021 dengan peserta dari unit organisasi Inspektorat Jenderal, Ditjen Bina Marga, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIN) dan BPSDM.

Bekerjasama dengan PusdiMaswas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agenda dari kegiatan ini yaitu Workshop I pada 19 s.d 21 Mei, Tugas Mandiri pada 24 s.d 28 Mei, dan Workshop II pada 2 s.d 3 Juni.

BPSDM Reviu Modul dan Kurikulum Guna Tingkatkan Keberhasilan Pelatihan

Jumat, 21 Mei 2021

47



Bandung, 21 Mei 2021 – Salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan suatu pelatihan adalah tersedianya kurikulum dan modul pelatihan yang valid, *up to date*, menarik, dan mudah dipahami. Termasuk juga modul integritas, pencegahan bahaya penyelenggaraan narkoba, dan pengarusutamaan gender yang merupakan materi wajib disertakan di setiap pelatihan. Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* Reviu Kurikulum dan Modul Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender di Bandung, Jumat (21/5).

Kementerian PUPR saat ini dihadapkan pada tantangan berat untuk menjaga integritas dan budaya anti korupsi, mengantisipasi bahaya penggunaan narkoba dan perlunya penerapan perspektif gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Mengingat pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas, pencegahan bahaya narkoba, dan perlunya penerapan perspektif gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur mendorong BPSDM PUPR memberikan materi tersebut pada setiap pelatihan yang dilaksanakan sejak tahun 2019 dan juga telah menyusun modul tersebut.

"Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen selaku unit kerja yang melaksanakan pengembangan kompetensi di bidang manajemen bermaksud untuk melakukan reviu terhadap modul Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender. Reviu dilaksanakan agar modul yang sudah ada sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi saat ini," ujar Diki Zulkaernan, Koordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Manajemen Umum dan Konstruksi dalam sambutan pembukaan FGD.

FGD yang diselenggarakan secara *step by step* dan daring ini merupakan salah satu tahapan dari reviu dan pengembangan kurikulum dan modul. Untuk itu dengan adanya FGD ini diharapkan diperoleh masukan substansi terhadap kurikulum pelatihan yang sedang dikembangkan, meliputi rancangan bangun pembelajaran (RBP) dan rencana pembelajaran (RP).

Modul Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender ini disusun oleh beberapa Widayawara berpengalaman dan ahli di bidangnya, antara lain, Sigit Erstanto Budi Utomo; R. Agoeng Triadi; dan RR Nur Inora Sapriyaningsih. Selain itu, beberapa pembahas yang kompeten juga hadir untuk memberikan masukan substansi mengenai materi tersebut.

33 Peserta Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Guna Penuhi Standar Kompetensi Manajerial

Senin, 24 Mei 2021

37



Jakarta, 24 Mei 2021 – Untuk memenuhi standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat administrator, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang dimulai pada Senin (24/5) di Jakarta.

Pelatihan Kepemimpinan Administrator diharapkan dapat menghasilkan sosok pemimpin administrator yang memiliki integritas tinggi dan memiliki kepemimpinan kinerja yang baik guna menggerakkan anggota timnya. "Dipakai sebelum itu persis di Unit Kerjanya itu kondisi kelemahannya ada dimana. Anda di masing-masing Unit Kerja itu pasti punya pemikiran-pemikiran bagaimana memajukan kinerjanya," ujar Sugiyarto dalam pidato pembukaannya.

"Kontribusi dari Unit Organisasi didapat dari kontribusi kinerja masing-masing Unit Kerja dengan turunannya, yaitu Satuan Kerja. Nah itulah yang akan berkontribusi pada kinerja Kementerian," lanjut Sugiyarto. Dengan memiliki kepemimpinan kinerja, pemimpin akan mampu menggerakkan semua anggota timnya untuk bekerja secara bersama dalam mencapai tujuan organisasi. Kemampuan mempengaruhi orang hingga secara sukarela mau bekerja untuk seorang pemimpin merupakan sebuah seni kepemimpinan pada level yang tinggi.

Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan Administrator maka peserta pelatihan akan dihadapkan pada 4 agenda pembelajaran yaitu: Pertama Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme. Kedua, agenda Kepemimpinan Kinerja. Ketiga, agenda Manajemen Kinerja, serta Keempat, agenda Aktualisasi Kepemimpinan. Keempat agenda pembelajaran inilah yang diharapkan nantinya akan mampu melahirkan sosok-sosok kepemimpinan ASN yang memiliki kemampuan kepemimpinan Manajemen Kinerja, terapannya birokrasi yang mampu melahirkan daya saing dan menggerakkan sebuah organisasi demi mencapai kinerja.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah III Jakarta ini dilaksanakan hingga 3 September mendatang selama 91 hari. Selama pelaksanaannya, peserta selama 31 hari *On Campus* (secara *blended learning*) dengan paduan metode klasikal dan *virtual class/distance learning* serta 60 hari *Off Campus* dimana peserta melakukan implementasi aksi perubahan di unit kerja masing-masing.

Sebanyak 33 orang peserta yang berasal dari unit organisasi Kementerian PUPR dan akan menjalani 797 Jam Pelajar (JP) dan diberikan materi oleh para pengajar berkompeten di bidangnya yang berasal dari Kementerian PUPR, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejabat Fungsional dan Instruktur.

Pahami Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui Pelatihan

Selasa, 25 Mei 2021

52



Banjarmasin, 25 Mei 2021 – Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN PUPR, khususnya dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) agar menjadikan proses PBJ lebih transparan dan akuntabel, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen menyelenggarakan Pelatihan Dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar di Banjarmasin.

"Dipakai peserta saat ini mungkin berada pada posisi sebagai Pokja atau staf perencana di setiap, tentu dituntut memiliki kompetensi dalam hal barang dan jasa. Atas dasar itulah pelatihan ini kami laksanakan," ungkap Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Nisch. Adam dalam sambutan pembukaan pelatihan melalui konferensi video, Senin (24/5).

Lebih lanjut Adam menjelaskan tentang terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjawab banyak tantangan salah satunya agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrument pembangunan.

"Di sini, kebijakan pengadaan harus bisa berdaya inovatif dan tidak melulu bertujuan untuk mendapatkan *value for money* yang semata-mata membeli barang/jasa dengan harga termurah," imbuh Adam.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengamanatkan agar mendorong pengembangan UMKM, penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu dengan diselenggarakannya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta khususnya dalam memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/teknis kompleks secara efisien dan efektif.

"Pelatihan ini dirancang agar peserta mampu memahami mengenai gambaran umum pengadaan, prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik dan dasar hukum/peraturan yang terkait, serta memahami prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum," tambah Adam.

Pelatihan yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VII Banjarmasin ini diselenggarakan dengan pola pelatihan *Blended Learning*. Terdiri dari sesi *E-learning* mulai tanggal 24 Mei s.d 3 Juni 2021, sesi *video conference* mulai tanggal 4 s.d 5 Juni 2021, dan sertifikasi secara klasikal dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2021. Pelatihan ini diikuti sebanyak 35 peserta yang berasal dari Kementerian PUPR Pusat serta daerah.

BPSDM Memperkuat Pengelola BMN Melalui Pelatihan

Senin, 28 Juni 2021

25



Makassar, 28 Juni 2021 – Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang kuat untuk menjalankan perubahan fungsi administratif menjadi fungsi manajemen. Maka, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengadakan Pelatihan Pengelolaan BMN hari ini, Senin (28/6) secara daring melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen yang difasilitasi oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah VIII Makassar.

"Pertanggungjawaban BMN yang dilakukan dalam bentuk laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. Dari laporan tersebut, akan dapat terukur kinerja Kementerian PUPR dalam melaksanakan pengelolaan BMN," ujar Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh, Adam, dalam pidato pembukanya.

"Agar dapat menjalankan tanggungjawab tersebut dengan baik, maka Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR dituntut untuk mengembangkan kompetensi di bidangnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi. Hal tersebut juga telah dicanangkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensinya," lanjut Adam.

Adam menambahkan, BMN merupakan salah satu tanggungjawab Kementerian PUPR dalam pengelolaan aset negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. Pengelolaannya yang semakin berkembang dan kompleks menghasilkan tantangan untuk melaksanakannya secara optimal.

Sebanyak 30 orang ASN yang berasal dari berbagai unit kerja dipersiapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Dilaksanakan secara daring dengan total 40 jam Pelajaran (JP), beberapa pengajar/widyaiswara yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya akan memaparkan materi hingga 6 Juli mendatang.

Materi yang akan dipaparkan yaitu Aset Lancar/Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya; Bimbingan Instalasi Aplikasi SIMAK BMN dan Barang Persediaan di Laptop atau Komputer Peserta; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Wasdal) BMN; Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN; Penatausahaan BMN; Pengamanan dan Pemeliharaan BMN; Pengenal dan Kebijakan Pengelolaan BMN; Penggunaan dan Pemanfaatan BMN; Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan Pengarusutamaan Gender; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN; Sistem Akuntansi dan Pelaporan BMN; dan Studi Kasus Pengelolaan BMN di PUPR.

BPSDM Perkuat Mitigasi Risiko Melalui Pelatihan

Kamis, 03 Juni 2021

43



Jakarta, 3 Juni 2021 – Penyelenggaraan Workshop Manajemen Risiko telah rampung dilaksanakan pada Kamis (3/6) di Jakarta secara tatap muka dan daring. Workshop yang telah dimulai sejak 19 Mei merupakan upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengenalikan risiko yang muncul dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah II Jakarta.

Adanya potensi risiko keuangan, risiko reputasi, risiko fraud/kecurangan, risiko hukum, risiko keselamatan kerja, risiko layanan, dan risiko kinerja yang muncul saat menjalankan tugas membangun infrastruktur menjadi perhatian untuk diminimalisir, untuk itu maka dibutuhkan adanya manajemen risiko.

Dalam pidato penutupnya, Kepala Pusbangkom Manajemen, Moeh Adam, menyatakan, "Selain untuk melaksanakan manajemen risiko secara komprehensif di Kementerian PUPR telah diterbitkan SE Menteri PUPR No.04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR dengan tujuan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko yang menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai sasaran serta meringkaskan kinerja di Kementerian PUPR," lanjut Adam.

Penerapan manajemen risiko mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian PUPR harus dilaksanakan secara komprehensif dan memiliki peran yang jelas antara 1st line, 2nd line, dan 3rd line. Manajemen risiko dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap mulai dari penyelenggaraan pekerjaan strategis, teridentifikasi risiko, analisis atau pengukuran risiko, evaluasi risiko serta respon risiko. Dengan menerapkan manajemen risiko, Kementerian PUPR diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dengan telah terlaksananya workshop ini diharapkan para peserta dapat melaksanakan internalisasi nilai-nilai Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal dalam melaksanakan tugas.

Berjasama dengan Pusat Penelitian dan Penelitian Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Puskabwas BPPK), Workshop Manajemen Risiko anggota ke-III ini merupakan rangkaian kegiatan dari program kegiatan workshop Manajemen Risiko yang di tahun 2021 ini dilaksanakan sebanyak 3 angkatan oleh BPSDM PUPR. Para pengajar yang ahli dan berkompetensi di bidangnya telah memberikan materi sejak 19 Mei lalu dengan total 47 jam Pelajar (JP).

Sebanyak 28 orang peserta yang berasal dari unit kerja/instansi sebagai 1st line, Unit Keptuhan Intern (UKI) sebagai 2nd line, dan dari Inspektorat Jenderal sebagai 3rd line berhadiah lulus seluruhnya. Adapun 3 orang diantaranya berhadiah meraih predikat peserta terbaik, Adinda Sufitiani dari Sekretaris Jenderal sebagai terbaik pertama, Dandy Rahadian dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai terbaik kedua, dan Anita Lydyah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dyah Sitaresmi Budianti, salah satu peserta dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan pendapatnya terhadap workshop ini. Dirinya mengaku mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam workshop ini, salah satunya, "Cara mengidentifikasi potensi masalah hingga pengendalinya, sehingga itu apa yang penting dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan dapat tercapai," ungkap Dyah.

Lebih lanjut Dyah mengatakan dengan mengikuti workshop ini juga mengubah cara berpikir dirinya dalam merencanakan strategi dalam mencapai tujuan pekerjaan, "Tidak hanya langkah-langkah kegiatan apa saja menuju ke sana tapi juga perlu mengetahui segala risiko yang akan dihadapi di dalam prosesnya," tutur Dyah.

BPSDM Tingkatkan Kualitas Pejabat Fungsional Melalui Pelatihan

Selasa, 08 Juni 2021

46



Makassar, 8 Juni 2021 – Untuk menghadirkan para pejabat fungsional yang memiliki daya saing, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam Bidang Jalan dan Jembatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen mengadakan Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama di Makassar, secara tatap muka dan daring.

"Sesuai dengan perannya sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur, pejabat fungsional Bidang PUPR harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai jenjangnya, sehingga benar-benar mampu menggerakkan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur," ujar Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh, Adam dalam pidato pembukaannya, Selasa (8/6).

"Meningkat hal tersebut sangat diperlukan pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang kompeten dan profesional. Selain itu, adanya amanah pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 13 Tahun 2019 bahwa PNS yang telah diangkat sebagai pejabat fungsional, paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional," lanjut Adam.

Adam menambahkan jumlah pejabat fungsional meningkat secara signifikan setelah adanya penyederhanaan jabatan struktural dan pengangkatan jabatan fungsional melalui mekanisme inpassing. Maka pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah VIII Makassar merupakan sebuah terobosan dalam pengembangan jabatan fungsional guna menjaga kualitas dari jabatan fungsional.

Sebanyak 35 peserta yang terdiri dari 30 ASN Kementerian PUPR dan 5 ASN Dinas terkait dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mengikuti pelatihan ini. Adapun kurikulum pelatihan sebanyak 45 jam Pelajaran (JP), yang dilaksanakan dengan metode Blended Learning dengan rincian sebagai berikut: Pembelajaran secara Distance Learning melalui Zoom Meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 Juni 2021 dan Pembelajaran secara Klasikal di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 17 Juni 2021.

Memahami Penyusunan Dupak, Salah Satu Manfaat Dalam Pelatihan Fungsional

Kamis, 10 Juni 2021

65



Medan, 10 Juni 2021 – Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan isu sentral dalam pemenuhan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusat) Manajemen berupaya untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang teknik jalan dan jembatan ahli pertama. Setelah berlangsung selama 11 hari dan tanggal 31 Mei 2021, Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah I Medan secara berkesinambungan telah rampung dan resmi ditutup. Kamis (10/6).

Arti salah satu peserta pelatihan dari Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur menyatakan pendapatnya pada pelatihan ini, dirinya mengaku sangat senang bisa kembali bertemu setara tanpa media langsung dengan beberapa pengajar maupun teman yang sudah lama tidak diikutkan.

Selain itu Arti juga menambahkan selaku jefung pertama mengalami kesulitan dalam penyusunan DUPAK. "Kami mengapresiasi sekali pelatihan jefung jalan dan jembatan ini dilakukan, karena selama ini kami mencoba menyusun DUPAK hanya berdasarkan pengetahuan teman di unit kerja. Dengan mengikuti pelatihan selama dua minggu ini kami sangat terbantu sekali dengan materi-materi yang sangat baik yang telah disampaikan oleh para pengajar," ujar Arti.

Dalam penutupan pelatihan tersebut, Kepala Pusbangkom Manajemen, Moh. Adam menyampaikan bahwa sejalan dengan amanah Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip ASN sebagai profesi adalah berlandaskan pada kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya. "Jabatan fungsional Bidang PUPR merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pembangunan khususnya sebagai motor penggerak dalam pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal," jelas Adam.

Adam menambahkan Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Angkatan I bagi para pejabat fungsional bertujuan dapat mewujudkan SDM yang kompeten dan berintegritas dan beretap materi yang diterima selama pelatihan ini dapat memberikan manfaat dalam bekerja sebagai pejabat fungsional, serta lebih penting lagi bagi organisasi Kementerian PUPR.

Selama kegiatan pembelajaran pelatihan berlangsung, telah diadakan evaluasi, meliputi pretest, posttest, latihan soal serta diskusi. Berdasarkan hasil evaluasi peserta oleh pengajar, jumlah kehadiran peserta dan juga keaktifan proses belajar mengajar, maka jumlah peserta yang dinyatakan "Lulus Pelatihan" sebanyak 32 orang dengan rincian adalah sebagai berikut: peserta dengan okeksi "Klemusian" sebanyak 1 orang atau nama Arif Saman, Dargi, ST., MT dan peserta dengan predikat "Baik Sekali" sebanyak 31 orang. Peserta yang telah selesai mengikuti Pelatihan dan dinyatakan lulus, akan mendapatkan sertifikat Pelatihan yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Memahami Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi melalui Pelatihan dan Sertifikasi

Rabu, 23 Juni 2021

45



Yogyakarta, 23 Juni 2021 – Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan program pemerintah yang telah dicantumkan khususnya dalam hal keselamatan konstruksi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen telah menyelesaikan Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi di Yogyakarta, Selasa (22/6).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang memberikan Pemerintah Pusat tanggung jawab atas penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas kompetensi bagi SDM pengelola Manajemen Keselamatan Konstruksi yang tersertifikasi, salah satunya melalui Pelatihan Dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi.

Kepala BPSDM PUPR, Sugiyantoro dalam pidatonya mengakan ASN adalah bagian dari suatu profesi yang menuntut untuk profesional dan kompeten, salah satu hal yang dapat membuktikan hal tersebut adalah dengan adanya sertifikasi profesi. "Salah pentingnya mempunyai sertifikat tersebut, mengandung suatu kompetensi bahwa anda sudah dianggap profesional dibidangnya," ungkap Sugiyantoro.

Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi sendiri dirancang secara khusus bagi setiap ASN PUPR agar mampu memahami regulasi/petunjuk teknis serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

"Anda memegang sertifikat ini sudah mengandung konsekuensi hukum bahwa anda selaku profesi ASN punya kompetensi di dalam sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, dibuktikan dengan adanya sertifikat dan registrasi sebagai Insinyur yang bisa praktik dalam menjalankan keselamatan, kesehatan kerja dalam suatu sistem managerial dari implementasi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri," tambah Sugiyantoro.

Untuk itu, Sugiyantoro berpesan dimasa depan para peserta pelatihan ditugaskan nantinya dapat bertanggungjawab atas sertifikasi yang telah dimiliki dan dapat betul-betul memahami, menyempurnakan, sekaligus dapat mengimplementasikan serta berupaya mengembangkan kompetensi dan kinerjanya sesuai dengan standar kompetensi jabatannya, sehingga dapat memberikan manfaat dalam rangka peningkatan kualitas ASN Kementerian PUPR.

Pelatihan yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta ini telah berlangsung dari 14 Juni 2021 dengan metode blended learning. Dari 28 orang peserta pelatihan seluruhnya dinyatakan lulus sehingga berhasil mengikuti Sertifikasi Ahli Muda K3 Konstruksi. 3 orang peserta mendapat predikat peserta terbaik yaitu, pengingat terbaik pertama dengan nilai 78,55 diarah oleh Agung Jodi Prakoso, dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman – Direktorat Jenderal Cipta Karya, pengingat terbaik kedua dengan dengan nilai 78,40 diarah oleh Dimas Bayu Susanto dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan pengingat terbaik ketiga dengan nilai 78,35 diarah oleh Ayu Listiani dari Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan – Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Salah satu peserta pelatihan, Ayu Listiani memberikan kesannya pada pelatihan ini. Sebagai pegawai yang ditugaskan di unit kerja non teknis, dirinya mengaku banyak memperoleh materi baru yang diberikan oleh para pengajar serta widyawan yang merupakan orang-orang yang kompeten. "Sangat bersyukur karena bisa belajar terkait konstruksi, karena itu menurut saya semua mata pelajaran yang ada diarahkan di pelatihan kali ini sangat bermanfaat dan membuka pengetahuan baru bagi saya," ungkap Ayu.

Ayu menantikan bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi walaupun pekerjaan detail dikerjakan oleh konsultan atau penyedia jasa, SDM PUPR itu harus lebih ahli dan jangan gampang dibodoh. "Jadi menurut saya pelatihan ini memang sangat membantu ketika kita akan berinteraksi langsung dengan penyedia jasa dan kita harus bisa melihat dan menilai bagaimana pekerjaan penyedia jasa dan konsultan tersebut," tutup Ayu. (Kompas BPSDM)

Peserta PKA Studi Lapangan Untuk Belajar Penerapan Organisasi Berkinerja Tinggi

Sabtu, 19 Juni 2021

40



Jakarta, 18 Juni 2021 – Dalam rangka membentuk membentuk karakter dan perilaku yang pancasilais, berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggungjawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang dilaksanakan melalui video conference dengan difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah III Jakarta sejak 24 Mei 2021.

PKA merupakan pelatihan yang wajib diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah atau akan duduk dalam jabatan struktural administrator (Eselon III). Pelatihan ini diadakan untuk mencetak calon pemimpin yang mampu memahami dan dapat mengambil tindakan pada setiap saat.

Salah satu agenda yang harus diikuti oleh peserta adalah Studi Lapangan di Instansi BUMN dengan tema "Penerapan Organisasi Yang Berkinerja Tinggi". Studi lapangan dilaksanakan pada 18 Juni 2021 secara virtual. Peserta PKA melakukan studi lapangan untuk belajar penerapan organisasi berkinerja tinggi di PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Dalam sambutannya Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah III Jakarta, Yunaldi, ST., MT menyampaikan tema Pelatihan Kepemimpinan Administrator "Organisasi yang Berkinerja Tinggi" yang bertujuan mampu memahami siapa pelanggan/stakeholder dan mengukur hasil yang sesuai dengan obsesi focus pada hasil dipandang dari sudut pandangan pelanggan/stakeholder. Struktur, proses dan praktik-praktik dalam organisasi berkinerja tinggi sejalan untuk mendukung visi, arah strategis, dan tujuan organisasi.

Studi Lapangan secara virtual diikuti oleh 32 peserta yang berasal dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menghadirkan Nixon Sitorus, selaku Coordinator Strategic Transformation Office PT. Jasa Marga Persero sebagai narasumber atau pengajar. Dalam paparannya Nixon menyampaikan pentingnya transformasi. Manfaatnya agar lebih fokus, fleksibel menangkap peluang, efisiensi dan inorganic growth.

Peserta PKN II Sampaikan Policy Brief Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional

Selasa, 29 Juni 2021

17

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Bandung, 29 Juni 2021 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) mengadakan Seminar Policy Brief Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dengan mengunjungi beberapa daerah (Kabupaten Toba, Labuan Bajo, Kota Semarang, dan Kota Surabaya). Hasil dari VKN inilah kemudian disusun sebuah Policy Brief yang berkaitan dengan tema pelaksanaan yang diangkat.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugiyartanto mengatakan dalam sambutan pembukanya secara daring Selasa (29/6), dalam rangkaian pelatihan ini peserta mengikuti Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dengan mengunjungi beberapa daerah (Kabupaten Toba, Labuan Bajo, Kota Semarang, dan Kota Surabaya). Hasil dari VKN inilah kemudian disusun sebuah Policy Brief yang berkaitan dengan tema pelaksanaan yang diangkat.

"Tujuan utama Policy Brief ialah menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dan urgensi dari isu tertentu yang ditujukan kepada pembuat kebijakan. Isu atau masalah yang diangkat dalam Policy Brief merupakan sintesa dari berbagai informasi yang diperoleh dari bukti di lapangan dan study literatur, sehingga pembuat kebijakan memahami inti dari latar belakang dari masalah/isu serta rekomendasi cara mengatasi masalah/isu tersebut," ujar Sugiyartanto.

"Oleh karena itu Seminar Policy Brief Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi serta dedikasi para peserta dalam menyusun bahan masukan kebijakan pimpinan yang komprehensif," lanjut Sugiyartanto.

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II kali ini bersifat tematik dengan mengusung tema "Pembangunan Infrastruktur Handal dengan Prinsip Good Governance untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peserta yang mengikuti pelatihan ini yaitu sebanyak 44 orang, dengan komposisi 24 orang dari internal Kementerian PUPR dan 20 orang dari luar instansi Kementerian PUPR.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan pada tahun 2021 ini, merupakan angkatan yang ke V yang diselenggarakan secara mandiri oleh Kementerian PUPR. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara yang selalu memberikan dukungan selama penyelenggaraan pelatihan ini.

Seluruh Peserta Lulus Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan

Jumat, 18 Juni 2021

46

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Makassar, 17 Juni 2021 – Setelah terlaksana selama tujuh hari sejak 8 Juni lalu, Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan di Makassar secara tatap muka dan daring telah rampung hari ini, Kamis (17/6). Pelatihan tersebut diselenggarakan sebagai salah satu upaya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen, guna membentuk pejabat fungsional (jafung) yang profesional dan kompeten di bidangnya.

"Tujuan dari pelatihan fungsional ini agar peserta mampu memahami rencana strategis pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan serta mengenali dirinya sebagai pejabat fungsional dan mampu menerapkan tugas, peran, dan fungsi ke-jafungannya," ujar Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh. Adam, pada pidato penutupnya.

Adam menambahkan, semua itu diwujudkan agar target dan sasaran strategis dalam upaya mendukung kinerja unit organisasi tercapai, serta para jafung dapat membuat dan mengusulkan DUPAK Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai mekanisme dan peraturan yang telah ditentukan.

Selain itu, pada Peraturan Menteri PAN-RR No. 13 Tahun 2019 telah mengamanatkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat sebagai pejabat fungsional paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional. Jika belum dinyatakan lulus, maka pejabat fungsional tidak bisa naik jenjang jabatan satu tingkat di atasnya.

Reza Kurniawan, S.T yang merupakan peserta pelatihan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan mengatakan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi dirinya serta unor tempat bekerja, meski masih ada pendalaman materi yang masih kurang menurut Reza.

Sebanyak 35 orang peserta dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah VIII Makassar. Adapun peserta yang meraih predikat peserta terbaik, yaitu terbaik pertama diraih oleh Reza Kurniawan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan dengan nilai 94, Naomi Padma Sivi sebagai terbaik kedua dengan nilai 93,5 dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Muhammad Mirza Anestantyo dengan nilai 93,2 dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo meraih terbaik ketiga.

BPSDM Mencetak Pengelola Barang/Jasa Pemerintah Andal Melalui Pelatihan

Jumat, 11 Juni 2021

45

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Barjasmid, 11 Juni 2021 – Setelah terlaksana sejak 24 Mei lalu, Pelatihan Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah di Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah VII Barjasmid telah rampung hari ini, Jumat (11/6). Pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen berupaya untuk menghadirkan pengelola barang/jasa yang profesional, andal, dan berintegritas melalui pelatihan secara daring dan tatap muka.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Pusbangkom Manajemen yang diwakili Kepala Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Heris Martuwi Susilo, pada pidato penutupnya, "Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia telah melakukan reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang diinisiasi oleh LKPP. Dari semula yang hanya merupakan tugas administratif dan ad-hoc menjadi menjadi elemen yang strategis dengan melibatkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional dan permanen."

Lebih lanjut Heris menyampaikan bahwa pengujian sistem pengadaan menjadi elektronik memungkinkan untuk akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi yang lebih andal, serta memunculkan partisipasi publik dalam memantau kinerja pengadaan pemerintah.

Heris juga menyampaikan bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menjawab banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah agar pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen pembangunan. Di sisi lain, kebijakan pengadaan harus bisa berdaya guna dan berdaya guna untuk mendapatkan value for money yang setara-maka membeli barang/jasa dengan harga termurah. Peserta 12 tahun 2021 diharapkan agar mendorong pengembangan UKM, penelitian, mempromosikan perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sebanyak 33 orang peserta telah menjalani sembilan hari pembelajaran secara daring, tiga hari melalui konferensi video, dan satu hari tatap muka saat sertifikasi. dinyatakan 33 orang peserta dapat mengikuti uji kompetensi dan dua orang lainnya dianggap tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Di antara 33 orang tersebut, 24 orang dinyatakan lulus dan sembilan orang dinyatakan tidak lulus. Pengajar/Widyaiswara yang kompeten dan ahli di bidangnya telah memaparkan materi dengan total 46 jam pelajaran (JP).

Peserta yang lulus dari pelatihan ini mendapatkan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan dari Pusbangkom Manajemen.

Peserta PKA Studi Lapangan Di Pemkot Semarang Secara Virtual

Senin, 21 Juni 2021 41

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Jakarta, 21 Juni 2021 – Guna mempersiapkan lahirnya sosok pemimpin administrator yang memiliki integritas tinggi dan kepemimpinan kinerja yang baik guna menggerakkan anggota timnya, maka terdapat salah satu agenda yaitu Studi Lapangan di Pemerintahan Kota Semarang pada Senin (21/6), di Jakarta secara virtual. Agenda studi lapangan dengan tema "Penerapan Organisasi Yang Berkinerja Tinggi" yang difasilitasi oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah III Jakarta ini adalah salah satu rangkaian pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diadakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen yang sudah berjalan sejak 24 Mei lalu.

"Tujuan dari agenda pembelajaran inovasi ini adalah untuk membekali peserta dengan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki *best practice* dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi," ujar Kepala Pusbangkom Manajemen, Moeh, Adam pada pidato pembukanya.

Lebih lanjut Adam menambahkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah diakui keunggulannya serta telah mendapatkan berbagai penghargaan atas inovasinya dalam mengelola tugas-tugas pemerintahan serta menyediakan pelayanan publik yang prima bagi warganya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pemilihan Pemerintahan kota Semarang khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes) menjadi lokasi studi lapangan bagi peserta pelatihan PKA dengan maksud untuk melihat, mengamati, dan mempelajari secara virtual/online pengelolaan tugas dan fungsi organisasi beserta keunggulan atau inovasi yang telah diterapkan Dinas tersebut.

Diharapkan agenda studi lapangan ini dapat memberikan pengayaan wawasan terkait strategi untuk menciptakan dan mengimplementasi dan mengadaptasi keunggulan atau inovasi Dinas-Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kementerian PUPR untuk diterapkan pada unit kerja peserta sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan Pelatihan PKA.

Sebanyak 32 orang peserta yang telah menjabat sebagai Pejabat Administrator (Eselon III) dari berbagai Unit Organisasi di Kementerian PUPR akan mengikuti agenda ini dengan total 22 jam Pelajaran (JP) selama 4 hari pelaksanaan. Dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Liti Setyawati dan menghadirkan narasumber Sekretaris DPM-PTSP, Soenarto; Kepala Bidang Statistik Diskominfo, Zakarias Susi Satya Hadi; dan Kepala Dinas Kesehatan, Mochamad Abdul Hakim.

32 Orang Peserta Berhasil Lulus Pelatihan Pengelolaan BMN

Rabu, 10 Juni 2021 43

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Palembang, 10 Juni 2021 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen berupaya untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam pengelolaan aset negara. Untuk itu, sudah berlangsung selama tujuh hari, Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang secara daring telah rampung, Rabu (9/6).

Seperti diketahui Kementerian PUPR diberi kepercayaan untuk mengelola APBN dengan anggaran sebesar, selain itu Kementerian PUPR juga memiliki kewajiban untuk mengelola aset negara yang berada di lingkungan Kementerian PUPR. Pengelolaan aset negara dalam hal ini meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pembelian, pemindahtanganan, pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan. Ujar Kepala Pusbangkom Manajemen, Moeh, Adam pada pidato penutupnya.

Adam menambahkan bahwa pengelolaan BMN saat ini memiliki berbagai masalah yang semakin kompleks dalam pelaksanaannya. Antara lain adanya proses penyerahan BMN yang diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah (Pemda) yang terus-menerus dengan nilai yang cukup tinggi. Selain itu masalah dalam pengelolaan BMN juga masih dijumpai adanya ketidaksihonestas pada proses penyusunan laporan BMN ditemukan adanya selisih antara nilai barang dan uang.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui BPSDM PUPR mengadakan pelatihan Pengelolaan BMN untuk meningkatkan kompetensi para pengelola BMN di lingkungan Kementerian PUPR. Diharapkan dengan terselesainya pelatihan ini para peserta mampu meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku ASN PUPR dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian PUPR untuk mendukung terwujudnya terobosan administrasi dan terobosan pengelolaan BMN serta penerapannya.

Setelah menjalani pelatihan sejak 31 Mei lalu, sebanyak 32 orang peserta dinyatakan lulus dan satu orang peserta mengundurkan diri. Sedangkan tiga diantaranya berhasil meraih peringkat peserta terbaik, yaitu Budi Fezal dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai terbaik pertama dengan nilai 90,09; Gregorius Fean Iddin Zebe Maru-so dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang sebagai terbaik kedua dengan nilai 86,57; dan Regine Dessyanti Muchtar dari Balai Wilayah Sungai Maluku Utara sebagai terbaik ketiga dengan nilai 86,27.

Beberapa pengajar/Widyaiswara telah memberikan materi mengenai Pengertian dan Kebijakan Pengelolaan BMN; Perencanaan, Kebutuhan, dan Penganggaran BMN; Penggunaan dan Pemanfaatan BMN; Pemeliharaan dan Pemeliharaan BMN; Penerimaan BMN; Pembiayaan Penghasilan; dan Pengadilan BMN; Peringkasan Integritas; Pencegahan Bahaya Narkoba dan Pengarusutamaan Gender; serta Sistem Akuntansi dan Pelaporan BMN dengan total 40 jam Pelajaran (JP).

Aden Baihaji, salah satu peserta pelatihan dari Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Perumahan menyatakan pendapatnya pada pelatihan ini. Dirinya mengaku mendapat banyak pengetahuan, salah satunya terkait kompleksnya siklus pengelolaan BMN yang harus diketahui dan dipelajari dirinya sebagai seorang pelaksana. Yang dalam hal ini juga masih kurang diketahui dan dipahami oleh sebagian pimpinan.

Selain itu Aden juga menambahkan pengetahuan lain yang dirinya dapatkan, "Pengetahuan dalam menyikapi sebuah temuan dari tim Pemeriksa atas sebuah kasus yang terkait dengan pengelolaan BMN, tidak semua temuan dari tim pemeriksa harus kita lyaikan, tetapi kita harus tebak. Pelajar dan dikaitkan dengan Peraturan-Peraturan yang ada sehingga kita dapat memberikan solusi yang terbaik," ujar Aden.

BPSDM Berupaya Perkuat Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Melalui Pelatihan

Selasa, 15 Juni 2021 34

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email Print

Yogyakarta, 14 Juni 2021 – Guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif, diperlukan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang mumpuni dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja. Pemerintah turut bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menciptakan sistem tersebut. Hal ini mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. Dengan harapan melalui kegiatan pelatihan ini, akan menghasilkan ASN yang kompeten dan profesional dalam bidang Keselamatan Konstruksi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian PUPR berupaya memenuhi sistem tersebut dengan mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Keselamatan Konstruksi (SMKK) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) Manajemen di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah V Yogyakarta secara daring dan tatap muka, Senin (14/6).

"Kecelakaan kerja berdampak terhadap kerugian material, korban jiwa, gangguan kesehatan, dan mengganggu produktivitas. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal," ujar Kepala Pusbangkom Manajemen Moeh, Adam pada pidato pembukanya.

Dalam Undang Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, peralatan, asset dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Adam menambahkan bahwa telah diamanatkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) serta pada pasal 70 ayat (1) mengamanatkan setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pelatihan ini akan berlangsung hingga 22 Juni mendatang dengan total 14 hari kerja dan 48 jam Pelajaran (JP). Sebanyak 25 orang peserta yang berasal dari berbagai unit kerja akan dipaparkan materi pelatihan secara daring oleh pengajar/Widyaiswara yang berkompoten di bidangnya dan menjalani sertifikasi secara tatap muka dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Gambar 29 - Tangkapan Layar Berita di website BPSDM April-Juni

BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam periode bulan April s.d Juni tahun 2021, Layanan Informasi Publik Pusbangkom Manajemen sedikit demi sedikit mengalami peningkatan dalam hal jumlah pengikut Instagram dan *draft* berita yang dikirimkan ke PPID Utama juga meningkat jumlahnya, walaupun terdapat beberapa kendala yang menjadi perhatian kami, antara lain:

- a. Keterbatasan bahan berita akibat penundaan kegiatan karena adanya pembatasan kegiatan dalam rangka penanggulangan Covid-19;
- b. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan guna melengkapi daftar informasi yang harus di publikasikan masih kurang rutin; dan
- c. Sistem koordinasi untuk mendapatkan data terkait kegiatan-kegiatan Pusbangkom Manajemen yang berlangsung masih belum matang.

Berbagai permasalahan tersebut di atas perlu diatasi dengan rencana tindak lanjut sehingga layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen dapat berjalan secara optimal.

BAB IV

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka perbaikan layanan informasi publik Pusbangkom Manajemen, disusun beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yaitu:

1. Optimalisasi koordinasi dengan subkor bidang terkait untuk memperkaya bahan berita;
2. Membuat list data yang harus diperoleh untuk publikasi yang maksimal; dan
3. Memperkuat koordinasi dengan subkor-subkor guna pengumpulan data terkait.